

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
MEKANISME PENGHITUNGAN PROFIT AND LOSS SHARING
DI BANK SYARI'AH**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :
RIFATON ALIYAH
B4A004046**

**Pembimbing :
Prof. H. Abdullah Kelib, SH**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
MEKANISME PENGHITUNGAN PROFIT AND LOSS SHARING
DI BANK SYARI'AH**

Pengesahan Tesis

Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Mengetahui

Pembimbing

Penulis

(Prof. H. Abdullah Kelib, SH)

(Rifaton Aliyah, SHi)

Ketua Program Pasca Sarjana

(Prof. Dr. Barda Hawawi Arif, SH)
NIP. 130 350 519

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Telaah Pustaka	14
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HUKUM ISLAM, “ <i>PROFIT AND LOSS SHARING</i> ”, DAN BANK SYARI’AH	22
A. Pengertian dan Sumber Hukum Islam	22
1. Pengertian Hukum Islam	22
2. Sumber-sumber Hukum Islam	25

B.	Bunga Bank, Riba, dan Profit and Loss Sharing	34
1.	Bunga Bank	34
2.	Riba	36
3.	<i>Profit And Loss Sharing</i>	39
C.	Sistem Operasional Bank Syari'ah	51
1.	Pengertian Bank Syari'ah	51
2.	Tujuan Bank Syari'ah	52
3.	Perkembangan Bank Syari'ah	53
4.	Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah	57
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA	66
A.	Mekanisme Penghitungan <i>Profit and Loss Sharing</i> Ditinjau Menurut Hukum Islam	66
B.	Pelaksanaan Akad Bagi Hasil	99
BAB IV	PENUTUP	132
A.	Kesimpulan	132
B.	Saran-saran	133
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	11
Tabel 2. Perbedaan Syari'at dan Fiqh	24
Tabel 3. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	50
Tabel 4. Perbedaan Bank Syari'ah dan Bank Konvensional	65
Tabel 5. Distribusi Pendapatan (Bagi Hasil)	67
Tabel 6. Distribusi Pendapatan (Bagi Hasil)	68
Tabel 7. Contoh Tabungan Mudharabah	69
Tabel 8. Ilustrasi Bagi Hasil Bank BRI Syari'ah	74
Tabel 9. Ilustrasi Distribusi Pendapatan Bagi Hasil DPK Bank Mandiri Syari'ah.....	77
Tabel 10. Mekanisme Penyelesaian Penghitungan Pembiayaan	81

ABSTRAK

Bank Syari'ah merupakan salah satu lembaga keuangan dengan prinsip Syari'ah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan Syari'ah. Mengingat Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan umat Islam, maka perlu juga dilihat dari sudut pandang agama Islam, khususnya tentang mekanisme penghitungan *Profit and Loss Sharing*, karena dalam pembayaran bagi hasil tersebut dipandang lebih besar dari bank umum, dan juga masih dipandang kurang menguntungkan bagi nasabah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penghitungan bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) di beberapa bank Syari'ah di cabang Semarang dan bagaimana pelaksanaan akad bagi hasil tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penghitungan bagi hasil (*Profit and loss sharing*) di Bank Syari'ah cabang Semarang. Dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad / perjanjian bagi hasil.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris karena sasaran penelitian ini pada masalah perbankan Islam untuk ditinjau menurut hukum Islam. Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis mengambil tempat di PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Mandiri Syari'ah, dan PT. Bank BRI Syari'ah. Adapun dalam pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan, dan juga melakukan studi dokumen, dan dilengkapi dengan studi lapangan di beberapa Bank Syari'ah di cabang Semarang.

Perhitungan bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) di pengaruhi oleh pendapatan bank, nisbah bagi hasil, perhitungan saldo rata-rata, sedangkan di bank konvensional (dengan sistem bunga) dihitung dari saldo akhir pada bulan yang bersangkutan, dalam hal pembiayaan mekanisme penghitungannya adalah ditentukan oleh besarnya pembiayaan, ekspektasi keuntungan bank, proyeksi penjualan, dan jangka waktu pembiayaan. Antara mekanisme penghitungan di bank Syari'ah dan bank konvensional, dapat terlihat bahwa pembayaran bagi hasil lebih besar dari bunga, hanya saja dalam bagi hasil nisbah ditentukan di awal perjanjian berdasarkan kesepakatan, dan sistem bagi hasil tidak dapat memastikan keuntungan di muka.

Dalam akad bagi hasil, ada dua akad yaitu Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah. Kedua akad ini hampir sama, perbedaannya terletak pada komposisi permodalan usaha. Jika bank memberikan pembiayaan sebagai tambahan modal atas usaha yang sudah berjalan, maka pembiayaan menggunakan akad Musyarakah. Namun, jika bank memberikan pembiayaan sepenuhnya terhadap permodalan usaha, maka pembiayaan ini disebut pembiayaan Mudharabah. Dalam pelaksanaan kedua akad tersebut, sudah sesuai dengan perjanjian yang berlaku dalam Islam, hanya saja bank dalam menentukan nisbah seringkali hanya ditentukan sepihak.

KATA KUNCI : Hukum Islam, Profit and Loss Sharing, Bank Syari'ah.

ABSTRACT

Syari'ah Bank represent one of the financial institution with principle of Syari'ah. Which in it's activity give in payment traffic. Principal of syari'ah is agreement order pursuant ti Islamic law between other party and bank to is depository find and or defrayal of bussines activity, or other activity matching with syari'ah. Considering Syari'ah Bank represent Islam people financial institution, hence needing is especially into Islam, specially about calculation mechanism of profit and loss lost holder locked into bigger than convensional bank, and as still locked into less to the profit to client.

Problem to this research is how calculation mechanism of profit and loss sharing some Syari'ah Bank in branch of Semarang and how execution of sharing holder agreement. As for target of which wish to be reached in this research is to know how calculation mechanism of profit and loss sharing in Syari'ah Bank branch of Semarang. And to know how execution of agreement of sharing holder.

Approach the problem used is approach yuridis normatif and yuridis empiris because target this research into problem of Syari'ah Bank considering Islamic law. The research study take place in PT. Bank Muamalat Indonesia, Pt. Bank Mandiri Syari'ah, and PT. Bank BRI Syari'ah. As for in data collecting gone through by conducting literature studies, documentary studies, and provided with field studies some Syari'ah Bank in branch of Semarang.

Calculation profit and loss sharing by earning of bank, sharing holder ratio, calculation of mean balance. While in convensional bank (whith flower system) reckoned by pertinent final balance, in the case of defrayal of it's calculation bank, sale projection, an defrayal duration. Between calculation mechanism in Syari'ah Bank an convensional bank, earn seen that payment of sharing holder is bigger than flower, just only in ratio sharing holder determined by in early agreement pursuant to agreement, and sharing holder system cannot ascertain advantage in the face of.

In sharing holder akad, there is two akad that is Akad Mudharabah and Akad Musyarakah. Both this akad much the same to, it's difference lay in capital employed composition. If bank give defrayal in addition capital of effort whish have walked, hence defrayal use akad Musyarakah. But, if bank give fully to capital employed, hence this defrayal is reffered as by defrayal of Mudharabah. In execution both akad, have as according to agreement going into effect in Islam, just only is bank in determining ratio oftentimes only determined by side.

KEYWORD : Islamic law, Profit And Loss Sharing, Syari'ah Bank

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam dengan jelas telah mengharamkan riba. Riba adalah tambahan atas uang pokok pinjaman.¹ Jadi riba merupakan suatu lebihan atas modal, maka ia meliputi semua jenis pinjaman uang dengan mengenakan bunga yang banyak atau sedikit. Karena itu banyak kalangan umat muslim yang berpendapat bahwa bunga bank itu termasuk riba, baik bunga untuk kepentingan yang produktif atau bunga untuk kepentingan yang tidak produktif.

Yang dimaksud dengan tambahan itu sendiri yaitu antara lain :

1. Tambahan kuantitas dalam penjualan asset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas;
2. Tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga hutang;
3. Tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan asset yang diharuskan adanya serah terima langsung. Misalnya penjual rupiah dengan Dolar, harus ada serah terima secara langsung, apabila ditunda serah terima tersebut maka ada unsur riba.²

Karena riba mempunyai dampak yang negatif diantaranya adalah dapat menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin, atau

¹ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: 1994, PT. Gunung Agung, hlm. 102.

² Abdullah Al-Muslih-Shalah Ash Shawi, *Bunga Bank Haram ? (Menyikapi Fatwa MUI, Menuntaskan Kegamangan Umat)*, Jakarta: 2003, Darul Haq, hlm 1-2.

mungkin dapat menyebabkan kebangkrutan usaha dan masih banyak lagi akibat-
 akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan riba, maka umat muslim tidak
 membenarkan penjualan praktek riba dan Islam pun dengan tegas melarang
 praktek riba, seperti terdapat dalam surat-surat Al Qur'an.

Surat Al- Baqarah ayat 275-279, menerangkan :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهُى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. / البقاره. ٢٧٥/
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. / البقاره. ٢٧٦/
إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. / البقاره. ٢٧٧/
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ. / البقاره. ٢٧٨/
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ
رُعُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. / البقاره. ٢٧٩/

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian
itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan daaari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan; dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekawatiran terhadap merupakan dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. (Al-Baqarah, ayat 275-279).³

Al Qur'an telah menjelaskan riba dalam empat (4) tempat terpisah, diantaranya adalah terdapat dalam surat Ali Imran ayat 130, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (ال عمران ١٣)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kanu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Ali Imran, ayat 130).⁴*

³ *Al Qur'an dan terjemahannya*, Medinah, Arab Saudi: 1412 H, Muja'mma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mush-haf Asy-Syarif, hlm 69-70.

⁴ *Ibid*, hlm 97.

Dalam surat An-Nisa' Allah SWT. Berfirman :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا / النساء ١٦٠ /
وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا / النساء ١٦١ /

Artinya : *“Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dari karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka mamakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka-mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.” (An Nisa', ayat 160-161)⁵*

Surat An Nisa' ayat 160-161 di atas menjelaskan diharamkannya riba terhadap orang-orang yahudi. Ini merupakan awal yang kemudian diharamkan riba tersebut terhadap kaum muslim.

Diharamkannya riba terakhir terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 39, yaitu :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ / الروم ٣٩ /

⁵ Ibid, hlm. 150

Artinya : *“Maka sesuatu riba (tambahan) yang kanu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Ar Rum, ayat 39)*⁶

Dari beberapa ayat Al Qur'an di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa hukum dasar dari riba adalah haram, terutama sekali riba pinjaman atau hutang dan para ulama seluruhnya telah bersepakat (berijma') untuk atas hal tersebut.

Ada beberapa bentuk aplikatif mengenai riba,⁷ yaitu yang pertama, riba pinjaman, yaitu penambahan atas hutang yang ditangguhkan masa pembayarannya dengan menambahkan jumlahnya.

Bentuk yang kedua adalah pinjaman dengan pembayaran tertunda, tapi dengan syarat harus dibayar dengan bunganya. Hutang itu dibayar sekaligus pada saat berakhirnya masa pembayarannya.

Dan bentuk yang terakhir adalah pinjaman berjangka dan berbunga dengan syarat dibayar perbulan (secara berkala).

Kalau sudah jelas bahwa modal atau uang adalah sebagai pinjaman yang mana masa pembayaran dibayar setiap bulan yang harus dibayar dengan bunganya, maka segala bunga yang dibayarkan oleh atau kepada bank adalah termasuk riba yang di haramkan oleh Al Qur'an. Oleh karena itu para ulama syari'at telah bersepakat bahwa bunga hutang sebagai kompensasi dari perpanjangan waktu pembayaran adalah riba yang jelas dan memang diharamkan oleh Al Qur'an.

⁶ *Ibid*, hlm. 647

⁷ Abdullah Al-Mushlih Ash-Shawi, *Op-Cit*, 2003 hlm. 6-8

Alasan bahwa bunga bank adalah riba itulah yang melatar belakangi berdirinya bank-bank syari'ah. Interpretasi tradisional yang menyimpulkan bahwa bunga bank yang sekarang menjadi praktek perbankan konvensional adalah sama dengan riba yang diharamkan Al Qur'an tersebut, sehingga bunga dan praktek perbankan konvensional-pun haram dan harus di jauhi oleh umat Islam. Sebagai gantinya, umat Islam harus mendirikan bank dan lembaga keuangan yang bebas bunga.

Perbankan syari'ah yang mulai berkembang di Indonesia, menegaskan bahwa perbankan syari'ah adalah perbankan bebas bunga yang didasarkan pada konsep profit and loss sharing atau prinsip bagi hasil (baik hasilnya berupa keuntungan maupun kerugian). Para bankir dan umat muslim yang menafsirkan riba termasuk bunga dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya atas modal, terutama modal uang. Karena umat muslim berpendapat bahwa penafsiran tentang arti riba secara tradisional tidak dapat berubah dan kekal adanya.

Dengan menafsirkan bunga adalah riba, maka setiap keuntungan yang ditambahkan atas pinjaman bagi pemberi pinjaman adalah riba. Untuk itu bank syari'ah tidak diperbolehkan untuk menerima segala bentuk transaksi pinjam-meminjam ataupun utang-piutang.

Bank-bank Islam atau syari'ah didirikan dengan tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Menyediakan lembaga keuangan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial, ekonomi masyarakat, yang diharapkan akan tersedianya kesempatan yang lebih baik untuk mengumpulkan modal dan pemanfaatan dana.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi.

3. Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasar efisiensi dan keadilan yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak antara lain dengan memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah.
4. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.⁸

Bank syari'ah didirikan dengan alasan untuk menjauhkan dari perbuatan riba. Oleh sebab itu bank syari'ah dalam kegiatan menggunakan prinsip bagi hasil yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syari'ah, yang mana aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pendanaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya.⁹ Dengan transaksi-transaksinya unsur bunganya tidak eksplisit, atau dikenal dengan suatu nama yang selain dengan bunga, seperti kontrak-kontrak jual beli dan barter mata uang, operasi-operasi komersial jangka pendek dengan nama mudharabah, musyarakah dan murabahah, yang dapat diterima oleh umat muslim dengan menggunakan upah, komisi dan laba.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa bunga yang sekarang ini menjadi dasar praktek perbankan konvensional adalah sama dengan riba yang diharamkan oleh Al Qur'an, sehingga bunga dan praktek perbankan konvensional pun haram adanya dan harus di jauhi oleh umat Islam. Sebagai gantinya, umat Islam harus mendirikan bank dan lembaga keuangan yang bebas bunga. Kemudian produk-produk pengganti bunga yaitu mudharabah dan musyarakah

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*, Bandung: 2002, Citra Aditya Bakti, hlm. 12-13.

⁹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari'ah*, Jakarta: 2005, Grasindo, hlm. 2.

yang berdasarkan pada sistem pada sistem bagi hasil atau yang dikenal dengan *profit and loss sharing* (PLS).

Profit and loss sharing adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.¹⁰

Profit and loss sharing (prinsip bagi hasil) merupakan karakteristik dasar dari bank Syari'ah dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Prinsip bagi hasil ini terdiri dari *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

Musyarakah adalah akad atau perjanjian kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, di mana keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama atas dasar kesepakatan.¹¹

Musyarakah ada dua jenis yaitu *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.¹²

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan antara dua orang atau lebih setuju bahawa setiap orang memberikan modal mereka pun sepakat berbagi

¹⁰ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMT Dan Takaful di Indonesia)*, Jakarta: 2002, Raja Grafindo Persada, hlm. 86.

¹¹ Brief case book, *Edukasi Profesional Syari'ah, konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, Jakarta: 2005, Renaisan, hlm. 42.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, Jakarta: 2001, Gema Insani, hlm. 91.

keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi : *Musyarakah 'Inan, Mufawadhah, A'mal, Wujuh dan Musyarakah Mudharabah*.¹³

Meskipun *Mudharabah* termasuk juga dalam jenis *Musyarakah*, namun *mudharabah* mempunyai landasan hukum tersendiri. Besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan salah satu diantaranya, kalau dalam *mudharabah* modal berasal dari salah satu, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari keduanya. Itulah yang menjadi perbedaan antara *musyarakah* dan *mudharabah*.

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.¹⁴ Adapun ketentuan umum pembiayaan *mudharabah* adalah :

- a.) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah, selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai, dan dapat berupa uang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
- b.) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara perhitungan dari pendapatan dan keuntungan proyek.
- c.) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah.
- d.) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah.

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu :

- a.) *Mudharabah Muthlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- b.) *Mudharabah Muqayyadah* yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.¹⁵

¹³ *Ibid.* hlm. 92.

¹⁴ Brief case book, *Op-Cit*, 2005 hlm. 45.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op-Cit*, 2001 hlm. 99.

Dalam perhitungan bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor-faktor secara langsung dan tidak langsung. Faktor secara langsung adalah :¹⁶

- a.) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia yang diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini :
- Rata-rata saldo minimum bulanan
 - Rata-rata total saldo bulanan
- Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- b.) Nisbah
- Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan harus disetujui pada awal perjanjian.
 - Nisbah antara bank satu dengan bank yang lainnya dapat berbeda.
 - Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu.
 - Nisbah juga dapat berbeda antara account satu dengan account yang lainnya sesuai dengan besarnya dana dan besarnya dana dan jatuh temponya.

Sedangkan faktor tidak langsung antara lain dipengaruhi oleh :

- a.) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.
Bank dan ansabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- b.) Kebijakan akunting (Prinsip dan metode akunting).
Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama yang berhubungan dengan pengakuan dan biaya.

Tetapi tidak sedikit umat Islam yang berpandangan sebaliknya, tidak melihat bunga sebagai riba. Dan karena dalam prakteknya banyak dijumpai bahwa konsep bunga dalam bank konvensional lebih sedikit dalam hal pembayaran kredit daripada pembiayaan di bank syari'ah yang menganut prinsip bagi hasil.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 139-140.

Bunga di bank konvensional harus dibayar karena bunga merupakan balas jasa, atau sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Ada hal-hal tentang teori bunga sebagai alasan kenapa bunga harus dibayar ?

a. Teori Nilai

Adalah teori yang berdasarkan bahwa nilai sekarang lebih besar daripada nilai yang akan datang. Menurut teori ini bunga merupakan pengganti atas perbedaan nilai tersebut. Bunga adalah besarnya penggantian Perbedaan antara nilai sekarang dengan nilai yang akan datang.

b. Teori Pengorbanan

Teori ini berdasarkan pemikiran bahwa pengorbanan yang diberikan seharusnya mendapatkan balas jasa berupa pembayaran.

c. Teori Laba

Teori ini mengemukakan bahwa bunga ada karena adanya motif laba yang ingin dicapai.

d. Teori Klasik

Teori Klasik mengemukakan bahwa semakin lama jangka waktu kredit, suku bunganya semakin besar.

e. Teori Kelompok Pasar

Bahwa jika permintaan pasar kelompok dana besar untuk jangka waktu satu bulan, tingkat bunga satu bulan akan lebih besar daripada tingkat bunga tiga bulan.

f. Teori Paritas Tingkat Bunga

Menurut teori ini, tingkat bunga penting dalam sistem devisa bebas. Dalam hal ini paritas tingkat yang sama besarnya dalam negara yang menganut devisa bebas.

Jika bank konvensional menandung unsur riba, apakah bank syari'ah juga tidak ribawi? Benarkah bank syari'ah sudah beroperasi sesuai dengan syari'ah? Bagaimana mekanisme penghitungan profit and loss sharing ?

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENGHITUNGAN PROFIT AND LOSS SHARING DI BANK SYARI'AH”.

B. Permasalahan

Perbankan Islam / Syari'ah sekarang telah menjadi istilah yang terkenal luas baik di dunia muslim maupun di dunia Barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas bunga kepada para nasabah. Para pendukung perbankan Islam berpendapat bunga adalah riba dan karenanya, menurut hukum Islam bunga bank diharamkan. Sikap seperti ini mendorong para praktisi muslim untuk mencari alternatif lain untuk mengembangkan sistem perbankan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, khususnya, aturan-aturan yang terkait dengan pengharaman riba.

Untuk melihat bagaimana cara bank-bank syari'ah dalam penghitungan profit and loss sharing (bagi hasil). Kemudian penulis akan mencermati bagaimana pelaksanaan akad (perjanjian bagi hasil).

Benarkah anggapan yang mengatakan bahwa sebagian umat muslim menghindari sistem perbankan karena keyakinan mereka bahwa bunga diharamkan? Apakah bank-bank syari'ah telah sepenuhnya bersikap adil kepada para nasabahnya, khususnya para penabung.

Untuk lebih jelasnya, dalam pembahasan ini, maka kajian dititikberatkan pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penghitungan bagi hasil (*profit and loss sharing*) bank-bank syari'ah ditinjau menurut hukum Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan akad bagi hasil ditinjau menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu antara lain :

1. Untuk memahami mekanisme penghitungan bagi hasil (*profit and loss sharing*) di dalam bank-bank syari'ah ditinjau menurut hukum Islam.
2. Untuk memahami pelaksanaan akad dengan sistem bagi hasil ditinjau menurut hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam buku penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank syari'ah, Wiroso menjelaskan, pembayaran imbalan bank syari'ah kepada deposen (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai mudharib atas pengelolaan dana mudharabah, apabila bank syari'ah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syari'ah memperoleh hasil yang kecil.

Kemudian dituliskan juga dalam distribusi pembagian hasil usaha bank syari'ah dengan nasabah (shahibul maal) penghimpunan dana hanya didasarkan pada akad mudharabah, pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan pada nisbah yang disepakati pada awal akad / perjanjian. Pihak yang melakukan penghitungan distribusi hasil usaha adalah selalu mudharib, karena salah aturan dalam prinsip mudharabah mutlaqah pemilik dana memberi kuasa penuh kepada mudharib untuk mengelola usaha untuk mendapatkan hasil usaha. Adapun faktor yang mempengaruhi perhitungan hasil usaha antara lain sebagai berikut :

1. Besarnya kontribusi investasi (pembobotan sumber dana).
2. Penentuan jenis sumber dana yang diikutsertakan dalam penghitungan distribusi hasil usaha.
3. Jenis penyaluran dana dan pendapatan yang terkait.
4. Penentuan pendapatan dibagi hasilkan.
5. Pemisahan jenis valuta.
6. Nisbah yang sudah disepakati di awal perjanjian.
7. Kebijakan akutansi.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, hlm. 88-108.

Dalam buku sistem dan prosedur operasional bank syari'ah karangan Muhammad, dituliskan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank harus ditetapkan sebelum penandatanganan pembiayaan. Nisbah dapat ditentukan seperti 70:30, 60:40 atau beberapa saja sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya bank dalam menentukan berapa besar nisbah bagi hasil yang akan diterimanya hendaklah memperhitungkan besar biaya dana (keuntungan bagi hasil untuk deposan dan penabung) serta biaya operasional bank lainnya. Yang terakhir dijelaskan bahwa dalam menentukan jumlah keuntungan yang akan dibagikan seandainya perjanjian merupakan kerjasama murni dalam bentuk proyek maka hendaklah mempergunakan perhitungan keuntungan sebelum dikenakan pajak.¹⁸

Pencatatan bagi hasil dapat dilakukan dengan menghitung saldo rata-rata harian selama satu bulan kemudian totalnya dibagi dengan jumlah hari pada bulan yang bersangkutan.¹⁹

Dalam buku pedoman akutansi perbankan syari'ah Indonesia, dijelaskan bahwa bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba atau bagi pendapatan. Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan mudharabah. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.²⁰

Jika bank menggunakan metode bagi laba dan usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan bank sebagai pengelola dana. Namun jika bank

¹⁸ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: 2000, UII Press, hlm. 20.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 87.

²⁰ Tim Penyusun PAPSI, *Pedoman Akutansi Perbankan Syari'ah Indonesia*, Jakarta: 2003, IAI, Cet 1, hlm. 176.

menggunakan metode bagi pendapatan, maka pemilik dana tidak akan menanggung kerugian, kecuali bank dilikuidasi dengan kondisi realisasi aset bank lebih kecil dari kewajiban.

Setiap masalah yang dihadapi manusia pada dasarnya semua ada hukumnya, baik hukum pidana, perdata ataupun hukum Islam (wajib, sunah, haram dan mubah), di samping juga ada hikmahnya atau motif hukumnya. Namun, hanya sebagian kecil masalah-masalah yang telah ditunjukkan oleh Al Qur'an atau As-Sunnah dengan keterangan yang jelas dan pasti, sedangkan sebagian besar masalah-masalah itu tidak disinggung dalam Al Qur'an atau As-Sunnah secara eksplisit, atau didinggung tetapi tidak dengan keterangan yang jelas dan pasti. Namun demikian bukan berarti Allah SWT. Lengah untuk mengatur hukum syari'at, tetapi itu menjadi tugas para ulama atau orang-orang yang punya keahlian untuk melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya. Begitu juga tentang hukum bermuamalah.

Islam sebagai agama, memuat ajaran yang bersifat universal komprehensif. Universal artinya bersifat umum, dan komprehensif artinya mencakup seluruh kehidupan. Berdasarkan ajaran agama Islam, sistem bermuamalah dalam Islam meliputi berbagai aspek ajaran, mulai dari persoalan hukum sampai pada lembaga keuangan. Lembaga keuangan diadakan dalam rangka aktivitas konsumsi, simpanan dan investor. Konsumsi berkaitan dengan kepentingan pribadi, simpanan adalah menabung, dan investasi dalam kegiatan seseorang dalam rangka investasi.

Umar Vadillo, dalam bukunya bank tetap haram “Kritik terhadap kapitalisme, sosialisme dan perbankan syari’ah”, menuliskan karena struktur dan wilayah kerja bank Islam / syari’ah berdasarkan suatu kontrak, fluktuasi harga yang muncul berpengaruh juga terhadap transaksi yang dilakukan bank. Akibatnya, semua kontrak yang dibuat bank Islam adalah riba karena kurang atau tidak adanya pemisahan secara penuh dari sistem moneter umum. Untuk itu setiap kontrak dagang yang disusun berdasarkan sistem itu sudah mengandung sifat riba karena nilai-nilai salah satu komoditas yang diperdagangkan (uang kertas) bertambah jumlahnya karena adanya tekanan dan paksaan serta monopoli perbankan negara.²¹

E. Metode Penelitian

Melihat permasalahan pokok pada penelitian ini adalah berkisar pada masalah penghitungan Profit and Loss Sharing (bagi hasil) Perbankan Islam yang ditinjau menurut hukum Islam. Maka dalam pembahasan penulis melakukan tela’ah terhadap literatur-literatur tertulis, seperti Al Qur'an sebagai sumber hukum Islam, serta buku-buku Fiqh lainnya yang dapat menunjang dalam pembahasan penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan Masalah

Permasalahan pokok pada penelitian ini termasuk salah satu masalah utama dalam hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu pendekatan Yuridis

²¹ Umar Vadillo penerjemah Sigit Kurnadi dan Tri Joko S, *Bank Tetap Haram (Kritik Terhadap Kapitalisme, Sosialisme dan Perbankan Syari’ah)*, Jakarta: 2005, Puzam, hlm. 122.

Normatif dan pendekatan Yuridis Empiris, karena sasaran penelitian ini pada masalah perbankan Islam untuk ditinjau menurut hukum Islam. Khususnya mengenai perhitungan *Profit and Loss Sharing*. Pendekatan Yuridis Normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah hukum Islam tentang mekanisme penghitungan *Profit and Loss Sharing* (bagi hasil). Memasukan hukum Islam yang dilandasi oleh Al Qur'an dan Hadits dalam mengambil suatu hukum yang dilandasi suatu latar belakang nilai-nilai, ajaran-ajaran, atau teori-teori tertentu, dan juga yang dilatar belakangi oleh penemuan-penemuan Empiris ke dalam produk hukum Islam.

Pendekatan Yuridis Empiris juga perlu untuk pendalaman, disamping sebagai pelengkap pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Empiris diperlukan untuk mengetahui gambaran penerapan hukum Islam yang didasarkan pada kejadian pada waktu turunnya ayat-ayat Al Qur'an.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh melalui penelitian langsung ke lapangan dan karena penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum Normatif maka penelitian ini berpusat pada data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan dan sumber dari hukum Islam, dan dari yang berupa dokumen-dokumen.

3. Metode Pengumpulan Data

Melihat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah ini.²² Dan juga menggunakan studi dokumen yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²³ Metode ini digunakan untuk mengutip data yang berupa dokumen yang ada hubungannya dengan bank syari'ah, khususnya yang menyangkut tentang bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Dan juga dilengkapi dengan studi di lapangan di beberapa bank Syair'ah di Cabang Semarang. Untuk memperoleh data lapangan penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²⁴
- b. Metode Interview yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁵ Interview ini perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dan dari sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung

²² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta : 2000, Gajah Mada University, hlm. 30.

²³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996, hlm. 54.

²⁴ *Ibid*, hlm. 73.

²⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004, hlm. 83.

atau lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten terhadap praktek sistem *Profit and Loss Sharing*.

4. Analisa dan Penyajian Data

Data yang diperoleh disajikan secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analitis dan preskriptif.

Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.²⁶ Analisa kualitatif secara deskriptif dan preskriptif, karena penelitian ini bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya tetapi juga bermaksud melukiskan realitas pelaksanaan perjanjian dengan sistem bagi hasil (*Profit and loss sharing*). Dalam pelaksanaan deskriptif dan preskriptif ini bertolak dari analisa Yuridis normatif kemudian dilengkapi dengan analisa Yuridis empiris dan analisa Yuridis komperatif.

5. Lokasi Penelitian

Beberapa Bank Syari'ah yaitu Bank Syari'ah Mandiri, Bank Muallamat Indonesia dan BRI Syari'ah, di wilayah Semarang merupakan lokasi yang diambil oleh penulis dengan alasan bahwa bank-bank tersebut adalah bank yang eksistensinya sudah dikenal di masyarakat luas.

²⁶ Suyono Abdurrahman, *Metodelogi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta : 1999, Rineka Cipta, hlm. 23.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan, penulis membagi beberapa bab, beberapa bab akan dibagi lagi ke dalam beberapa sub dan seterusnya. Sistematika pembagian tersebut adalah sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan Bab Pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang uraian global mengenai persoalan yang akan dibahas dalam bab selanjutnya. Bab ini terdiri atas : Latar Belakang Permasalahan, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Tela'ah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab Kedua merupakan tinjauan pustaka mengenai hukum islam profit and loss sharing dan sistem operasional di Bank Syari'ah yang meliputi : pengertian dan Sumber-sumber Hukum Islam, Bunga Bank, Riba Dan Profit And Loss Sharing, serta Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah

Bab Ketiga merupakan hasil penelitian dan analisa yang menguraikan tentang : Mekanisme penghitungan Profit and Loss Sharing, pelaksanaan akad bagi hasil.

Bab ke empat adalah Bab yang terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran-saran dan diakhiri dengan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HUKUM ISLAM, PROFIT AND LOSS SHARING DAN SISTEM OPERASIONAL BANK SYARI'AH.

A. Pengertian dan Sumber Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Dalam kehidupan sehari-hari hukum Islam sering dikenal dengan kata Fiqih Islam atau Syari'at. Kedua kata tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan tentang ajaran agama Islam yang memenuhi aspek-aspek hukum. Antara kata Fiqih dan Syari'at dalam penggunaan sehari-hari tidak ada perbedaan arti, padahal kalau dikaji secara mendalam kedua kata tersebut mempunyai arti yang berbeda.

Kata syari'at itu sendiri mencakup seluruh ajaran Islam, yang menyangkup ibadah, muamalah, ahklak ataupun Fiqih itu sendiri, yang semuanya bersumber dalam Al Qur'an. Sedangkan Fiqih hanya sebagian dari Syari'ah tersebut.

Menurut para Ulama Syari'ah adalah hukum- hukum yang berasal dari Allah untuk para hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu.

Menurut istilah Syari'ah itu berarti jalan yang harus diikuti oleh umat Islam.¹ Menurut istilah Syari'ah adalah aturan-aturan yang digariskan Allah agar manusia berpegang kepada-Nya, di dalam hubungan manusia dengan

¹ Ramulyo, Mohd. Idris, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 8

Tuhan-Nya, manusia dengan saudaranya sesama muslim, dengan alam dan di dalam hubungannya dengan kehidupannya.²

Jadi dapat diketahui bahwa Syari'at adalah semua yang difirmankan Allah SWT baik yang diperintahkan maupun yang dilarang yang berhubungan dengan perbuatan setiap umat muslim dalam menjalani kehidupan.

Sedangkan Fiqih menurut bahasa berarti memahami, mengetahui dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan.³ Sedangkan menurut istilah Fiqih adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang amaliah (mengenai perbuatan perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqih adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan perenungan.⁴

Dari pengertian kedua kata tersebut di atas (Syari'ah dan Fiqih), dapat diketahui bahwa antara Syari'ah dan Fiqih. Sama-sama hukum Islam hanya saja Syari'ah berasal dari wahyu Allah yaitu Al Qur'an, sedangkan Fiqih merupakan karya manusia yang dapat berubah sari waktu ke waktu. Untuk itu ada perbedaan yang perlu diketahui yaitu :

a. Berdasarkan Obyeknya

Berdasarkan obyeknya Syari'ah, meliputi hubungan batin antara manusia dengan sang pencipta (hablumminallah). Sedangkan Fiqih obyeknya peraturan hubungan antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluk yang lain.

² A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 2

³ *Ibid*, hlm. 4

⁴ *Ibid*, hlm. 5

b. Berdasarkan Sumber Pokok

Syari'at bersumber pada Al Qur'an, sedangkan Fiqih berasal dari radio atau hasil pemikiran para imam mazhab atau ulama-ulama, yang mana hukum tersebut dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman.

c. Berdasarkan Sanksi

Menurut sanksinya Syari'at merupakan pembalasan dari Allah SWT, secara tidak langsung.

Perbedaan pokok antara Syari'at dan Fiqih dapat juga dituliskan sebagai berikut :

Tabel 1.

Perbedaan Syari'ah dan Fiqh

Syari'at	Fiqh
a. Berasal dari wahyu Ilahi (Al Qur'an) dan sunah Rasul (hadits)	a. Karya manusia yang dapat berubah dari waktu ke waktu
b. Bersifat Fundamental	b. Bersifat instrumental
c. Hukumnya bersifat Qathi (tetap, tidak tetap berubah)	c. Hukumnya zhanni (dapat berubah)
d. Hukum Syari'at hanya satu (Universal)	d. Banyak, berbagai ragam (inse-dental)
e. Menunjukkan kesatuan	e. Menunjukkan keragaman
f. Langsung dari Allah yang terdapat dalam Al Qur'an dan penjelasannya terdapat dalam hadits apabila kurang dipahami	f. Berasal dari ijtihad para ahli hukum sebagai hasil pemahaman manusia
g. Disebut juga Islamic law	g. Hukum Fikih disebut juga Islamic Juris Prudence

Pengertian Syari'at dan Fiqih tersebut di atas, biasa digunakan oleh masyarakat untuk mengartikan hukum Islam, namun pada umumnya Syari'at maupun Fiqih digunakan oleh umat Islam untuk menentukan perbuatan mukalaf seperti wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, sah, fasid, batal dan lain sebagainya.

Dapat diambil kesimpulan, Hukum Islam dalam arti yang sempit adalah kaidah-kaidah atau norma-norma kemasyarakatan yang bersumber pada Al Qur'an, sunnah dan ijmak. Sedangkan dalam arti yang luas hukum Islam meliputi segala hal yang bersifat manusiawi maupun yang bersifat Ketuhanan. Keduanya merupakan satu-kesatuan hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Hukum Islam juga merupakan keseluruhan hukum pada hak, kewajiban dan paksaan, tapi juga pada hukum tentang wajib, sunnah, jaiz, makruh dan haram. Yang memuat pengertian pahala, dosa, pujian, celaan dan pembiaraan.

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Konsepsi hukum Islam yang berorientasi kepada agama dengan dasar doktrin keyakinan dalam membentuk kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan Syari'at, sumber hukumnya merupakan satu kesatuan yang berasal hanya dari firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Melalui cara Nabi berkata, berbuat dan diam dalam menghadapi manusia dengan tingkahlakunya dapat dikembangkan sesuai suasana yang dibutuhkan dalam pergaulan hidup tetapi tidak menyimpang dari sumber hukum asalnya. Sumber-sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama adalah Al Qur'an dan sunnah Nabi. Adapun sumber lainnya, yaitu ijma', Qiyas, Istihsan, maslahah mursalah, 'Ury, istishab dan lainnya

digunakan dan ditempatkan sebagai metode berijtihad. Namun pada umumnya sumber hukum Islam yang dipakai dibagi menjadi empat macam yaitu Al Qur'an, Sunnah Rosul (Nabi). Ijma' dan Qiyas.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, selain Al Qur'an dan Sunnah Rasul, sumber hukum Islam yang dapat digolongkan dalam sumber ketiga, yaitu pikiran, ra'yu atau ijtihad. Ijma' merupakan kesepakatan bulat pendapat dalam Ijtihad yang dilakukan secara kolektif. Sedangkan Qiyas merupakan satu metode dalam Ijtihad.⁵

Dalam uraian berikut, secara ringkas akan dibahas sumber-sumber hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

a. Al Qur'an

Al Qur'an adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum Fundamental yang perlu dikaji dengan teliti. Al Qur'an merupakan kumpulan wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada umat dengan perantara Nabi Muhammad.⁶

Kata Al Qur'an berasal dari kata kerja Qara-a artinya (dia telah) membaca. Kemudian berubah menjadi kata Gen dan Qur'an, yang secara harfiah berarti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari.⁷

Al Qur'an merupakan dasar-dasarsegla bidang ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya kosmologi dan pengetahuan alam. Namun pengetahuan yang terkandung di dalam Al Qur'an itu hanyalah prinsip-prinsipnya saja. Untuk menemukan prinsip oleh rang harus menghayati

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta; UII Press, 2000, hlm. 3

⁶ Mohd. Idris Rahmulyo, *Op-Cit*, hlm. 45

⁷ Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Rajawali, 1991, hlm. 70

arti yang sebenarnya, kemudian mencari dasar ilmu pengetahuan itu sendiri bukan penjelasan dari ilmu pengetahuan tersebut. Jadi Al Qur'an bukan saja sebagai sumber ajaran keagamaan, tetapi juga sumber segala ilmu pengetahuan. Begitu juga tentang hukum, mengatur tentang hukum pidana dan juga hukum perdata.

Hukum-hukum yang terkandung dalam Al Qur'an ada tiga macam yaitu :

- Hukum-hukum I'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, kepada Malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada para Rasulullah dan kepada hari Akhir.
- Hukum-hukum Khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak, tingkah laku manusia.
- Hukum-hukum Amaliah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yaitu mengenai ibadah dan muamalah.⁸

Al Qur'an yang merupakan sendi Fundamental dan rujukan pertama bagi semua dalil dan hukum Syari'at, merupakan Undang-Undang Dasar, sumber dari segala sumber dan dasar dari semua dasar, maka Al Qur'an juga mempunyai ciri dan keistimewaan tersendiri, yaitu antara lain :

- Lafazt dan maknanya datang dari Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui malaikat Jibril dengan jalan wahyu, Al Qur'an berbeda dengan hadits walaupun keduanya sama-sama perkataan nabi.
- Bahwa Al Qur'an diturunkan dengan lafazt dan gaya bahasa Arab, yang sulit untuk dijelaskan dalam bahasa biasa. Bagaimanapun baiknya penjelasan, tafsiran atau terjemahan Al Qur'an, terjemahan Al Qur'an itu bukanlah Al Qur'an. Terjemahan Al Qur'an, bagaimanapun baiknya, tidak sama dan tidak boleh disamakan dengan Al Qur'an.
- Bahwa Al Qur'an disampaikan atau diterima melalui jalan tawatur yang menimbulkan keyakinan dan kepastian tentang kebenarannya.⁹

⁸ A. Djazuli, *Loc-Cit*, hlm. 63

⁹ Sulaeman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 10-12

Dalil-dalil diluar Al Qur'an adalah sunnah, Ijma' dan Qiyas yang semuanya sebenarnya terbit dari Al Qur'an. Berdasarkan hal ini, maka tidaklah cukup untuk melakukan istinbath hukum dari Al Qur'an tanpa meneliti penjelasannya yaitu AS Sunnah / Hadits Nabi.

b. As Sunnah dan Al Hadits

As Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al Qur'an. As Sunnah adalah semua perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah SAW. yang berfungsi sebagai petunjuk dan tasyri'.¹⁰ Pengertian tersebut menunjukkan 3 (tiga) bentuk Sunnah yaitu berupa perkataan (Sunnah Qauliyah), Perbuatan (Sunnah Fi'liyah dan berupa pengakuan atau persetujuan terhadap perkataan atau perbuatan orang lain (Sunnah Taqririyah) oleh Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadits, yang merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al Qur'an.¹¹

As Sunnah menjadi hujah, bisa dijadikan sumber hukum karena :¹²

- Allah menyuruh untuk taat kepada Rasulullah. Taat kepada Rasulullah adalah juga berarti taat kepada Allah.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا . الحشر ٧ /

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah.” (Al Hasyr :7)¹³

- Rasulullah mempunyai wewenang untuk menjelaskan Al Qur'an, seperti dalam Surat An-Nisa ayat 80 :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ . النساء ٥٨ /

“Barang siapa yang mentaati Rasulullah sesungguhnya, ia telah menataati Allah” (An Nisa : 80)¹⁴

¹⁰ *Ibid*, hlm. 20

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Op-Cit*, hlm. 86-87

¹² A. Djazuli, *Loc-Cit*, hlm. 168-169

¹³ Al Qur'an dan terjemahannya, Madinah, Arab Saudi: Mujamma' Al Malik Fahd Lithiba'at Al Mush-haf Asy-Syarik, 1412 H, hlm. 196

¹⁴ *Ibid*, hlm. 132

- Ijma' sahabat dan dibuktikan pula oleh hadits Muadz bin Jabal yang menerangkan urutan-urutan sumber hukum.

Maksud dari sunnah itu sendiri sebenarnya sudah terkandung dalam Al Qur'an. Jadi kedudukan sunnah adalah sebagai pelaksana dari Al Qur'an dan bukan pengganti atau pengoreksi terhadap Al Qur'an.¹⁵

Menurut Prof. H.A. Djazuli As Sunnah menjadi sumber hukum yang kedua, karena :

- Wurudl Al Qur'an Qath'i seluruhnya, sedangkan As Sunnah banyak yang wurudlnya dhani.
- As Sunnah merupakan penjelasan terhadap Al Qur'an, yang dijelaskan yang sudah pasti menempati tempat yang pertama, dan penjelasannya menempati tempat yang kedua.
- Urutan dasar hukum yang digunakan oleh para sahabat yang menempatkan As Sunnah pada tempat yang kedua.¹⁶

Adapun fungsi As Sunnah terhadap Al Qur'an dalam hukum menurut beliau adalah sebagai berikut :

- As Sunnah berfungsi sebagai penjelas, memerinci yang mujmal mengkhususkan yang umum.
- Hukumnya sudah disebut dalam Al Qur'an kemudian As Sunnah menguatkannya dan menambahnya.
- As Sunnah memberi hukum tersendiri yang tidak terdapat dalam Al Qur'an.¹⁷

Jadi jelas, hukum-hukum yang terdapat dalam sunnah bisa berupa hukum-hukum yang menguatkan dalam Al Qur'an atau hukum yang menjelaskan terhadap hukum yang ada di dalam Al Qur'an atau hukum-hukum yang tidak disebut dalam Al Qur'an.

Seperti halnya Al Qur'an, Sunnah pun dalam penerapannya menganut prinsip-prinsip tidak menyulitkan, menyedikitkan tuntutan atau

¹⁵ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1992, hlm. 67

¹⁶ A. Djazuli, *Op-Cit*, hlm. 69

¹⁷ *Ibid.*

pembebanan, bertahap dalam penerapan dan sejalan dengan kemaslahatan manusia.

c. Ijma'

Ijma' menurut bahasa, mengandung dua pengertian, yaitu : Ittifak adalah kesepakatan, dan 'azam yaitu cita-cita atau hasrat.¹⁸

Ijma' menurut ulama adalah kesepakatan seluruh mujtahid kaum muslimin disesuaikan masa setelah Nabi SAW wafat tentang suatu hukum syara' yang amali, dan tentang suatu kasus tertentu.

Menurut R. Abdul Djamali, Ijma' adalah kebulatan pendapat (konsensus) para ulama besar pada suatu waktu dalam merumuskan suatu yang baru sebagai hukum Islam. Tolak pangkal perumusan di dasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an dan hadits, dan merupakan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.¹⁹

Dari pengertian / definisi tersebut di atas dapat diambil beberapa makna yaitu antara lain :

- Terdapat beberapa orang mujtahid, karena kesepakatan baru bisa terjadi apabila ada beberapa mujtahid.
- Harus ada kesepakatan di antara mereka.
- Kebulatan pendapat harus tampak nyata, baik dengan perbuatannya, dengan keputusannya atau dengan perkataannya.
- Kebulatan pendapat orang-orang yang bukan mujtahid tidaklah disebut mujtahid.

¹⁸ Sulaeman Abdullah, *Op-Cit*, hlm. 42

¹⁹ R. Abdul Djamali, *Op-Cit*, hlm. 68

Dalam merumuskan hukum baru dan kemudian memperoleh konsesus, menurut R. Abdul Djamali yaitu sebagai :

- Pertama : Ijma' Qauli yaitu apabila konsesus seorang ulama besar dilakukan secara aktif dan lisan (ucapan) terhadap pendapat seorang ulama atau sejumlah ulama tentang perumusan hukum baru yang telah diketahui umum.
- Kedua : Ijma' Sukuti yaitu apabila konsesus terhadap pendapat hukum baru dilakukan secara diam (tidak memberi tanggapan).²⁰

Ijma' bentuk pertama yang disebut juga Ijma' hakiki atau Ijma' Al Sharih yaitu Ijma' dengan tegas persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun perbuatan dan merupakan hujah menurut pendapat ulama, sedangkan bentuk kedua disebut Ijma' ali'tiban yaitu pendapat ulama bukan hujah.²¹

Ijma' dihasilkan oleh para mujtahid / ulama, karena itu merupakan salah satu bentuk-bentuk berijtihad, dilihat dari sisi hukum yang dihasilkan dengan konsesus para ulama harus ditaati seluruh kaum muslim, maka Ijma' ini ditempatkan sebagai sumber hukum yang ketiga sesudah Al Qur'an dan As Sunnah.

d. Qiyas

Qiyas merupakan metode pertama yang dipegang para mujtahid untuk mengistimbahkan hukum yang tidak diterapkan nash, sebagai metode yang terkuat dan paling jelas.

²⁰ *Ibid.*

²¹ A. Djazuli, *Op-Cit*, hlm. 76-77

Qiyas adalah pemikiran secara analogis deduktif, maksudnya suatu hukum yang belum diketahui dengan hukum yang telah diketahui karena persamaan illah (sebab).²²

R. Abdul Djamali, memberikan pengertian dias dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu :

- Pertama : Menurut logika, Qiyas artinya mengambil suatu kesimpulan khusus dari dua kesimpulan umum sebelumnya (Syllogisme).
- Kedua : Menurut hukum Islam, Qiyas artinya menetapkan suatu hukum dari masalah baru yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan memperhatikan masalah lama yang sudah ada hukumnya yang mempunyai kesamaan pada segi alasan dari masalah baru itu.²³

Menurut Prof. H.A. Djazuli Qias mempunyai beberapa unsur / rukun,²⁴ yaitu :

1. Ashal yaitu sesuatu yang dinash-kan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyaskan. Ashal ini harus berupa nash, yaitu Al Qur'an, As Sunnah atau ijma'. Di samping itu Ashal ini juga harus mengandung illat hukum.
2. Cabang yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya yaitu yang di Qiyaskan. Untuk cabang ini harus memenuhi syarat
 - Cabang tidak mempunyai hukum yang tersendiri
 - Illat hukum yang ada pada cabang harus sama dengan yang ada pada Ashal
 - Cabang tidak lebih dahulu ada daripada Ashal
 - Hukum cabang sama dengan hukum Ashal

²² Mohd. Idris Rahmulyo, *Op-Cit*, hlm. 55

²³ R. Abdul Djamali, *Op-Cit*, hlm. 69

²⁴ Dikutip lengkap dari A. Djazuli, *Op-Cit*, hlm. 77-79

3. Hukum Ashal yaitu Hukum syara' yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang. Untuk hukum Ashal harus dienuhi syarat-syarat :

- Hukum Ashal harus merupakan hukum yang amaliah
- Hukum Ashal harus ma'Qul al-ma'an artinay persyariaatannya harus rasional
- Hukum Ashal bukan hukum yang khusus
- Hukum Ahsal masih tetap berlaku

4. Illak Hukum yaitu suatu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau munasabah dengan ada dan tidak adanya hukum. Illah hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Illat harus merupakan sifat yang nyata
- Illat harus merupakan sifat yang tegas dan tertentu dalam arti dapat dipastikan wujudnya pada cabang
- Illat hukum mempunyai kaitan dengan hikmah hukum dalam arti Illat tadi merupakan penerapan hukum untuk mencapai Maqasidul Syari'ah
- Illat bukan hanya sifat yang hanya terdapat pada Ashal, sebab apabila sifat itu hanya terbatas pada Ashal tidak mungkin dianalogikan
- Illat tidak berlawanan dengan nash, apabila berlawanan dengan nash-lah yang didahulukan

Dengan 4 sumber hukum Islam yang telah diuraikan secara singkat tersebut, maka hukum Islam secara luwes dan kuat akan tetap dapat berkembang dan menyesuaikan berlakunya hukum sepanjang masa

sebagaimana diperlukan dalam perkembangan pergaulan hidup masyarakat.

Selain 4 (empat) sumber hukum Islam tersebut juga ada sumber hukum Islam yang lain yaitu Istihsan adalah mengambil ketetapan yang dipandang lebih baik sesuai dengan tujuan Islam. Dengan jalan meninggalkan dalil khusus untuk mengamalkan dalil umum.

Ijtihad adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum adanya ketentuan lain yang membatalkannya.²⁵

Adat istiadat atau 'Urf yang tidak bertentangan dengan ketentuan Syari'at dapat dikokohkan tetap berlaku bagi masyarakat yang mempunyai adat istiadat tersebut. Maka hukum Islam, hukum adat setempat masih dapat dipandang berlaku, selama tidak bertentangan dengan ketentuan nas Al Qur'an dan Sunah Rasul.

B. Bunga Bank Riba dan Profit and Loss Sharing

1. Bunga

Bunga adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan bank karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam.

Bagi bank konvensional bunga merupakan hal penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan penyaluran kreditnya, penarikan tabungan dan pemberian kresit selalu dihubungkan dengan tingkat suku bunganya. Bunga bagi bank bisa menjadi biaya yang harus dibayarkan

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Op-Cit*, hlm. 5

kepada penabung, tetapi dilain pihak, bunga dapat juga merupakan pendapatan bank yang diterima dari debitur karena kredit yang diberikan.

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang yang dibayar oleh debitur kepada kreditur.²⁶

Selain itu bunga juga dapat diartikan sebagai harga penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan,²⁷ kreditur meminta bunga atas uang yang dipinjamkan kepada debitur, hal ini karena ada beberapa teori tentang bunga yaitu :

a. Teori Nilai

Yaitu teori yang didasarkan pada anggapan bahwa nilai yang sekarang lebih besar daripada nilai yang akan datang. Jadi perbedaan nilai ini harus mendapat penggantian dari peminjam atau debitur. Penggantian nilai ini yang disebut dengan bunga. Jadi dapat dikatakan bahwa bunga besarnya penggantian perbedaan antara nilai sekarang dengan nilai yang akan datang.

b. Teori Pengorbanan

Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pengorbanan yang didirikan seharusnya mendapatkan balas jasa berupa pembayaran. Teori ini mengemukakan bahwa jika pemilik uang meminjamkan uangnya kepada debitur, selama uangnya belum dikembalikan debitur atau bank, kreditur tidak dapat mempergunakan uang tersebut. Pengorbanan debitur inilah yang harus dibayar debitur. Pembayaran inilah yang disebut bunga.

c. Teori keuntungan

Teori ini mengemukakan bahwa bunga bank ada karena adanya motif laba yang ingin dicapai. Bank dan pelaku ekonomi mau dan bersedia membayar bunga didasarkan atas laba yang akan diperolehnya. Di sini dapat dikatakan bahwa laba merupakan pendorong bagi terciptanya bunga

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 12-19

baik bagi pengusaha, maupun bagi masyarakat untuk menabung uangnya secara efektif dan produktif.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bunga bank itu termasuk riba atau bukan?.

2. Riba

Secara bahasa, riba berarti tambahan.²⁸ Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan peminjam kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.

Menurut Masfuk Zuhdi riba adalah tambahan atas uang pokok pinjaman.²⁹ Jadi riba merupakan suatu lebihan atas modal, maka ia meliputi semua jenis pinjaman uang dengan mengenakan bunga yang banyak sedikit, karena itu banyak kalangan umat muslim yang berpendapat bahwa bunga itu riba, baik bunga untuk kepentingan yang produktif atau bunga untuk kepentingan yang tidak produktif.

Yang dimaksud dengan tambahan itu sendiri yaitu antara lain :

1. Tambahan kuantitas dalam penjualan asset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas.
2. Tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga hutang.
3. Tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan asset yang diharuskan adanya serah terima langsung. Misalnya, penjual rupiah dengan Dolar, harus ada serah terima secara langsung, apabila ditunda serah terima tersebut maka ada unsur riba.³⁰

Riba menurut hukum Islam dilarang (haram), hal ini tercantum dalam Al Qur'an, Surat Al Baqarah ayat 275 sampai ayat 279. Selain itu juga

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Safiudin Sidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta: Intimedia, 2004, hlm. 31

³⁰ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, Cet. II, 1994, hlm. 102

terdapat dalam surat Ali Imron ayat 130, An-Nisa' ayat 160 sampai 161, dan yang terakhir terdapat dalam Surat Ar-Rum ayat 39. riba menurut hukum Islam haram karena riba dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mereka yang terlibat riba pada khususnya.

Adapun dampak riba tersebut antara lain yaitu :

1. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
2. Uang modal besar yang dikuasai oleh *the haves* tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif, misalnya pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain, yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi pemilik modal sendiri, tetapi modal besar itu dimanfaatkan dalam perkreditan berbunga yang belum produktif.
3. Bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada akhirnya dapat mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman dan bunganya.³¹

Dengan alasan bahayanya yang sangat besar atau dampak negatif dari praktek riba, maka riba dalam agama Islam dengan tegas melarang / haram hukumnya.

Riba menurut Prof. Abdullah Al-Mushlih,³² ada dua macam yaitu riba pinjaman, yaitu yang dijelaskan keharamannya dengan diturunkannya ayat Al Qur'an. Yang kedua riba jual beli yakni riba yang dijelaskan dalam As-Sunnah.

1. Riba Jual Beli

Yaitu riba yang terdapat pada penjualan komoditi riba kelebihan / tambahan, seperti emas, perak, gandum dan lainnya. Alasan Fungsional yang jelas diharapkan emas dan perak akan nilai tukarnya. Jadi apabila hal-hal tertentu yang memiliki nilai tukar yang sama seperti emas dan

³¹ Abdullah Al Muslih dan Shalah Ash Shawi, *Bunga Bank Haram (Menyikapi Fatwa MUI, Menuntaskan Kegamangan Umat)*, Jakarta: Darul Haq, 2003, hlm. 1-2

³² Masfuk Zuhdi, *Op-Cit*, hlm. 103

perak. Maka alasan fungsional sebagai riba tersebut juga terdapat padanya. Maka nilai mata uang sekarang sama / setara dengan emas dan perak. Begitu juga dengan makanan pokok yang dapat disimpan.

Dan riba jual beli ini menjadi dua pintu yaitu riba fadhal (riba yang samar) dan riba nasi'ah (riba yang jelas). Riba Fadhal yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda atau bahan yang sejenis. Riba Fadhal ini diharamkan karena untuk mencegah timbulnya riba nasi'ah, jadi bersifat preventif. Riba nasi'ah itu sendiri merupakan riba yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran utang.

Sayid Sabiq mengartikan riba nasi'ah yaitu tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang mengutangi dari orang yang berhutang, sebagai imbalan atas penundaan pembayaran utangnya.³³

2. Riba Pinjaman

Yaitu riba terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungan, baik dalam wujud penjualan, pinjaman dan sejenisnya yaitu tambahan (bunga) dari hutang karena ditanggungkannya waktu pembayaran. Riba ini merupakan riba yang sangat jelas yang banyak terjadi dalam masyarakat.

Riba dilarang oleh agama, karena riba dapat mendatangkan bahaya besar yaitu antara lain :

1. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan menghilangkan semangat kerja sama atau saling tolong menolong sesama manusia.
2. Riba dapat menimbulkan tumbuhnya mental kelas pemboros yang tidak bekerja, juga dapat menimbulkan adanya penimbunan harta tanpa kerja keras. Islam menganjurkan umat untuk bekerja dan menjadikan kerja sebagai mata pencaharian.

³³ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Op-Cit*, hlm. 11-17

3. Riba sebagai salah satu cara menjajah, karena itu orang berkata penjajahan berjalan dibelakang pedagang.
4. Dengan dilarangnya riba Islam menyeru agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik.³⁴

Jadi riba dapat ditafsirkan bahwa dalam suatu cara tidak diizinkan tambahan pada pinjaman termasuk bunga dalam bank, bahwa bunga dengan segala bentuknya, segala jenisnya dan untuk semua tujuan adalah sepenuhnya diharamkan dalam Islam. Lalu bagaimana dengan profit and loss sharing (sistem bagi hasil) dalam bank Syari'ah. Apakah termasuk bunga, yang mana profit and loss sharing tersebut juga termasuk tambahan atas modal dasar.

C. Profit And Loss Sharing

Para teoritis perbankan Syari'ah melaksanakan kegiatan-kegiatan bank Syari'ah harus didasarkan pada dua konsep yaitu mudharabah dan musyarakah atau yang dikenal dengan istilah Profit And Loss Sharing (PLS). Para teoritis ini berpendapat bahwa bank Syari'ah menyediakan sumber-sumber pembiayaannya pada para peminjam dengan prinsip berbagi hasil dan berbagai resiko.

Bagi hasil dapat diartikan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha ini antara penyedia dana dengan dana. Yang mana pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antar bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.³⁵

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, Penerjemah Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al Ma'arif, 1996, hlm. 120

³⁵ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 2002, hlm. 8-9

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sistem bagi hasil (Profit and Loss Sharing / PLS) ini didasarkan pada 2 (dua) bentuk produk yaitu Mudharabah dan Musyarakah.

1. Mudharabah

Mudharabah adalah suatu perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama (Shahibul mal) menyediakan dana, dan pihak kedua (Mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama, ketika rugi Shahibul mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras keterampilan manajerial selama proyek berlangsung.³⁶ Syarat-syarat Mudharabah sebagai berikut :

a. Modal

- Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang benar beredar.
- Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- Modal harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkan melakukan usaha.

b. Keuntungan

- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti
- Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak

³⁶ Muchammad Parmudi, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, Yogyakarta: Kutub, 2005, hlm. 63

- Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shahibul mal.³⁷

Mudharib pada hakekatnya memegang 4 (empat) jabatan fungsionaris :

- a. Mudharib yang melakukan dharb, perjalanan dan pengelolaan usaha, dan dharb ini merupakan saham penyertaan dari padanya.
- b. Wakil berusaha atas nama perkongsian yang dibiayai oleh shahib al-mal. Hal ini akan tampak jelas sekali terutama dalam mudharabah al-muqayyadah (mudharabah terbatas).
- c. Syarik, yaitu partner penyerta, karena dia berhak untuk menyertai shahib al-mal dalam keuntungan usaha.
- d. Pemegang amanat, yaitu dana mudharabah dari shahib al-mal, dimana ia dituntut untuk menjaganya dan mengusahakannya dalam investasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, termasuk mengembalikannya manakala usaha sudah usai.³⁸

Bentuk produk Mudharabah tersebut terdiri dari dua jenis , yaitu Mudharabah muthlaqah dan Mudharabah Muqayyadah.

Mudharabah muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah adalah akan antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk mendapatkan keuntungan. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad.
- Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. Mudharib mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak ada batasan, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.
- Penerapan mudharabah muthlaqah dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

³⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 13

³⁸ *Ibid.* hlm. 17

- Pemilik modal (tabungan mudharabah) dapat mengambil dananya, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- Deposit mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, 1,3,6, atau 12 bulan.³⁹

Mudharabah Muqayyadah

Jenis Mudharabah Muqayyadah ini merupakan simpanan khusus (restricted), di mana pemilik dana (shahibul maal) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank sebagai pengelola (mudharib), baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya. Ketentuan Mudharabah Muqayyadah sebagai berikut :

- Bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (baik pemerintah atau lembaga keuangan lainnya) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka sepakati.
- Rekening dioperasikan berdasarkan prinsip Mudharabah Muqayyadah
- Bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungan biasanya dinegosiasikan secara kasus per kasus.⁴⁰

Mudharabah Muqayyadah ada dua jenis yaitu :

Pertama, Mudharabah Muqayyadah *on Balance Sheet*, yaitu :

- Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan,

³⁹ *Ibid.* hlm. 17-18

⁴⁰ Briefcase Book, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, Jakarta: Renaisan, 2005, hlm. 39

- serta resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad
- Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib memisahkan dana ini dari rekening
 - Untuk deposito Mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.⁴¹

Kedua, Mudharabah Muqayyadah of *Balance Sheet*, yaitu :

- Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat di atas pos tersendiri dalam rekening administratif
- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana
- Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.⁴²

Mudharabah tidak secara langsung disebutkan oleh Al Qur'an atau Sunnah, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk kongsi dagang semacam tampaknya terus hidup disepanjang periode awal Islam sebagai tulang punggung perdagangan karavan dan perdagangan jarak jauh.

Mudharabah digunakan terutama sebagai suatu instrumen dagang yaitu jual beli. Mazhab Maliki dan Syafi'i menekankan bahwa Mudharabah adalah instrumen dagang murni, mereka tidak dapat menerima Mudharabah yang dipersyaratkan. Dan Imam Hanafi melihat Mudharabah sebagai suatu kontrak dagang yaitu suatu kontrak di mana investor mempercayakan sejumlah uang kepada mudharib yang separuh atau sepersekiannya adalah investasi dengan selebihnya bisa dalam bentuk suatu pinjaman atau tabungan.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 40

⁴² *Ibid.*, hlm. 41

Tujuan dari kontrak semacam ini adalah untuk memperluas keragaman yang mungkin dalam keuntungan dan resiko.⁴³

2. Musyarakah / Syarikah

Musyarakah atau Syarikah adalah akad kerjasama udaha ptungan antara dua pihak atau lebih atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, di mana keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁴

Secara garis besar Musyarakah dapat dibagi kepada tiga Syarikah Malak dan Syarikah Uqud. Syarikah Amlak berarti eksistensinya suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak membentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya. Sedangkan Syarikah Uqud berarti perkongsian yang berbentuk karena suatu kontrak.⁴⁵

Bentuk Syarikah Amlak terbagi atas :

- Amlak Jabar, terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.
- Amlak Ikhtiar, terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Bebas artinya adanya pilihan untuk menolak.⁴⁶

Bentuk Syarikah Uqud terbagi menjadi 5 jenis yaitu :

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Dikutip dari Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah (Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis)*, Alih Bahasa Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004, hlm. 77

⁴⁵ Briefcase Book, *Op-Cit*, hlm. 43

⁴⁶ Muhamad, *Op-Cit*, hlm. 11

a. Syirkah Inan

- a.) Besarnya modal masing-masing anggota tidak harus sama.
- b.) Masing-masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif langsung dalam pengelolaan usaha, tetapi ia juga dapat menggugurkan hak tersebut dari dirinya.
- c.) Pembagian keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal masing-masing, tetapi dapat juga atas dasar negosiasi. Kerugian maka perentase didasarkan pada modal masing-masing.⁴⁷

b. Syirkah Mufawadah

Dalam Syirkah Mufawadah disyaratkan :

- a.) Samanya modal masing-masing. Seandainya salah satu partner memiliki lebih banyak permodalan, maka Syirkah tidak sah.
- b.) Mempunyai wewenang bertindak yang sama. Tidak sah apabila Syirkah antara anak kecil dan orang dewasa.
- c.) Mempunyai agama yang sama.
- d.) Masing-masing menjadi penjamin lainnya atas apa yang ia beli dan jual. Seperti kalau mereka menjadi wakil. Tidak dibenarkan sakah satu diantara mereka mempunyai wewenang lebih dari lainnya.⁴⁸

c. Syirkah Abdan

Syirkah Abdan atau Syarikah Amal yaitu Syarikah sekerja di mana dua (2) orang atau lebih yang sama atau berdekatan bentuk kerjanya menerima pesanan dari pihak ketiga dan membagi keuntungan melalui negosiasi bersama.⁴⁹

Dalam Syirkah Abdan disyaratkan :

- Adanya bentuk kerja sejenis atau tidak jauh berbeda.
- Adanya kerjaan yang dipesan orang lain.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al Ma'arif, 1995, hlm. 177

- Baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh mereka sendiri.⁵⁰

d. Syirkah Wujud

Dinamakan Syirkah Wujud karena dalam Syarikah ini para sekutu hanya berandaskan pada wujud, yaitu kepercayaan, wibawa, dan nama baik saja. Unsur modal tidak sesuai dengan kesepakatan bersama.

e. Syirkah Mudharabah

Sungguhpun pada dasarnya Mudharabah dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk Musyarakah, namun para cendekiawan Fiqih Islam melatakkannya dalam posisi yang khusus dan mendirikan landasan hukum tersendiri. Perbedaan antara Mudharabah dan Musyarakah terletak pada besar kontribusi atas manajemen dan keuangan salah satu diantaranya. Kalau dalam Mudharabah berasal dari keduanya.

Dasar hukum Musyarakah terdapat dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ . النساء ٢١ /

Artinya : *Tetapi jika saudara-saudara selbu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.*⁵¹

Surat Shaad ayat 24 :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ . النساء ٨٠ /

Artinya : *Dan sesungguhnya kebanyakan sari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain,*

⁵⁰ Muhamad, *Op-Cit*, hlm. 13

⁵¹ Rahmadi Usman, *Loc-Cit*, hlm. 23

*kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh.*⁵²

Hadits-hadits yang dapat dijadikan rujukan dalam hal Syarikah yaitu, Hadits

Riwayat Abu Daud,

“Dari hadits Qudsi diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW, bersabda : Allah SWT. telah berkata kepada saya, menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut.”

Hadits riwayat Abu Daud, Baihaqi dan Al Hakim :

“Rahmat Allah tercurahkan atas dua pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan pengkhianatan. Manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkatan pun akan sirna pada dirinya.” (HR. Abu Daud, Baihaqi dan al-Hakim).⁵³

Dan ijma' ulama, bahwa kaum muslimin telah berkongsi akan keabsahan Musyarakah secara umum walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen dari padanya.

Dalam pendistribusian hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil, baik laba maupun rugi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan operasi utama

Pendapatan operasi utama bank Syari'ah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yang dibenarkan Syari'ah, yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli. Pendapatan penyaluran dana prinsip bagi hasil, pendapatan penyaluran dana prinsip ijarah, serta pendapatan penyaluran dana lain yang sesuai dengan prinsip Syari'ah. Jadi, pendapatan operasi utama bank Syari'ah inilah yang akan dibagikan kepada Shahibu Maal.

Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil ini adalah pendapatan dari pengelolaan dana sebesar porsi dana Mudharabah yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank Syari'ah.

⁵² Al Qur'an dan Terjemahannya, *Loc-Cit*, hlm. 117

⁵³ *Ibid*, hlm. 735

2. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat

Merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank Syari'ah kepada pemilik dana Mudharabah Mutlaqoh. Penentuan besarnya bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan kepada pemilik dana investasi tidak terikat tersebut dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan profit distribution. Porsi bagi hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan pemilik dana investasi tidak terikat bukan sebagai beban bank Syari'ah, karena besarnya bagi hasil yang diberikan sangat tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diterima oleh bank Syari'ah.

3. Pendapatan operasi lainnya

Penyaluran dana bank Syari'ah mengenakan Fee administrasi atas penyaluran tersebut yang disepakati antara bank sebagai pemilik dana dan debitur sebagai pengelola dana. Oleh bank Syari'ah pendapatan Fee administrasi tersebut menjadi milik bank sendiri karena pendapatan tersebut merupakan upah administrasi yang dilakukan oleh bank Syari'ah.

Pendapatan operasi lain yang diperoleh oleh bank Syari'ah dalam memberikan pendapatan atas kegiatan usaha bank Syari'ah dalam memberikan layanan jasa keuangan lain yang berbasis imbalan.

4. Beban operasi

Dalam pembagian hasil usah dengan prinsip bagi hasil semua beban dikeluarkan oleh bank Syari'ah sebagai Mudharib, baik beban yang untuk kepentingan pengelolaan dana Mudharabah, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi dan beban operasi lainnya ditanggung oleh bank Syari'ah sebagai Mudharib. Beban-beban tersebut tidak diperkenankan dipergunakan sebagai faktor pengurang dalam pembagian hasil usaha.⁵⁴

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BAGI HASIL

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil diantaranya ada faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah Invesent rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio).

⁵⁴ Dikutip Dari Briefcase Book, *Op-Cit*, hlm. 43-42

Invesment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan invesment rate sebesar 80 persen, berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini :

- Rata-rata saldo minimum bulanan
- Rata-rata total saldo bulanan

Invesment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan nisbah (profit sharing ratio).

- Salah satu ciri al musharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian
- Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda
- Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu
- Nisbah juga dapat berbeda antara *account* dan *account* yang lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya

Faktor-faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi bagi hasil adalah :

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah
 - Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and loss sharing*). Pendapatan untuk dibagihasilkan merupakan pendapatan untuk diterima dikurangi biaya-biaya
 - Jika semua biaya ditanggung bank, hal tersebut disebut *revenue sharing*

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.⁵⁵

Sekali lagi, Islam mendorong praktek bagi hasil dan mengharamkan riba, keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :⁵⁶

Tabel 2

Perbedaan Bunga dan bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio / nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya persentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

⁵⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: Grasindo, 2005, hlm. 120-122

⁵⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 139-140

D. Sistem Operasional Bank Syari'ah

1. Pengertian Bank Syari'ah

Istilah lain dalam bank Syari'ah adalah Bank Islam dan bank Muamalah. Secara akademik istilah Islam dan Syari'ah memang berbeda. Namun, secara teknik penyebutan Bank Syari'ah dan Bank Islam mempunyai pengertian yang sama. Para pakar Perbankan Islam memberikan beberapa definisi.

Menurut perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syair'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Salah satu unsur yang harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktek-praktek yang mengandung unsur riba, kemudian diganti dan pembiayaan perdagangan.⁵⁷

Dijelaskan pula bahwa Bank Syari'ah adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Hadits, sesuai dengan anjuran dan larangan tersebut, maka yang di jauhi adalah praktek-praktek yang mengandung unsur riba, sedangkan yang diikuti adalah praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah.⁵⁸

*Cholil Uman mengartikan bank Syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam. Sudah tentu bank Syari'ah tidak memakai sistem bunga, sebab bunga dilarang oleh Islam. Sedangkan bank non Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga.*⁵⁹

Menurut M. Amin Aziz, yang dimaksud dengan bank Syari'ah adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan Syari'ah Islam. Hal ini berarti, operasional bank Syari'ah harus sesuai dengan

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 60-61

⁵⁸ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, hlm. 1-2

⁵⁹ *Ibid*.

tuntutan Al Qur'an maupun hadits, yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan Syari'ah Islam.⁶⁰

Demikian pula dengan Warkum Sumitro, mengatakan bahwa bank Islam berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islami, yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Hadits.⁶¹

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan bank Syari'ah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an dan Hadits. Bank Syari'ah diperbolehkan untuk mengeluarkan produk, jasa dan kegiatan usaha perbankan yang baru, yang mana sebelumnya bertentangan atau selaras dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Al Qur'an ataupun Hadits.

2. Tujuan Bank syari'ah

Tujuan didirikannya Bank Syari'ah adalah :

- a) Menyediakan lembaga perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat banyak.
- b) Meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi.
- c) Menyediakan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam, yang pada awalnya menganggap bahwa bank konvensional adalah bank yang berdasarkan bunga dan itu sama dengan riba yang dilarang.
- d) Berkembangnya lembaga dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat.

⁶⁰ Cholil Usman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Ampel Suci Surabaya, 1994, hlm. 5-6

⁶¹ M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia I dan II*, Jakarta: Bangkit, 1992, hlm. 1

- e) Untuk mendidik masyarakat agar berfikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.⁶²

3. Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia

Umat Islam telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan Syari'at Islam. Karena bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, dianggap riba yang dilarang, dan haram hukumnya. Maka muncullah ide untuk mendirikan Sayari'ah yang berbasis bagi hasil.

Pelaksanaan keinginan untuk menerapkan prinsip Syari'ah di bidang lembaga keuangan di tanah air dimulai dengan berdirinya koperasi pada tahun 1980-an.⁶³ Pertama kali didirikan di Bandung yaitu koperasi Baitul Tamwil jasa keahlian Teknosa pada tanggal 30 Desember 1982. Hal ini didorong oleh keluarnya deregulasi perbankan Paket 1 Juni Tahun 1983, yang telah membuka belenggu penetapan bunga bank oleh pemerintah. Namun bank Syari'ah belum dapat berdiri karena bank-bank yang sudah ada belum menganggap sistem bank tanpa bunga sebagai bisnis yang menguntungkan.

Setelah dikeluarkannya PAKTO (Paket Kebijakan Pemerintah bulan Oktober) tahun 1988 yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain yang telah ada, dimulailah pendirian bank-bank Perkreditan Rakyat Syari'ah di beberapa daerah di Indonesia, yang pertama kali memperoleh izin usaha adalah BPR Syari'ah Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat pada

⁶² Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 5-6

⁶³ Briefcase Book, *Op-Cit*, hlm. 27

tanggal 10 Nopember 1991 di Aceh, yang kemudian mendorong didirikannya Bank Umum Syari'ah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992.

Yang kemudian disusul akhirnya gagasan mengenai bank Syari'ah itu muncul lagi sejak tahun 1988⁷⁸ di saat pemerintah mengeluarkan PAKTO yang berisi liberalisasi Industri Perbankan. Para Ulama waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat menjadi pedoman kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Dengan berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia di tahun 1994.

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai kerja tim perbankan MUI, akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi. Namun, sebelum pendirian BMI tersebut, sebenarnya bank Syari'ah yang pertama kali mendapat izin adalah BPRS Berkah Amal dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991.

Kemudian munculnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, prinsip bagi hasil diakui. Dalam UU tersebut pada Pasal 12 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha BPR menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran negara Republik Indonesia No. 119 Tahun 1992.

Dalam menjalankan perannya, Bank Syari'ah berlandaskan pada UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip Bagi Hasil yang

kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang pada pokoknya menetapkan hak-hak, antara lain :

- a. Bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
- b. Prinsip bagi hasil yang dimaksudkan adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan Syari'ah.
- c. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas syari'ah (DPS).
- d. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan usaha tidak dengan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pendirian Bank Muamalat Indonesia tersebut diikuti oleh perkembangan bank-bank BPRS, namun adanya dua (2) jenis bank tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu dibangunlah lembaga-lembaga simpan-pinjam yang disebut Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembang

perbankan Syari'ah. Dari UU tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan Syari'ah dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga.
- b. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
- c. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memerhatikan unsur moral.
- d. Pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan Syari'ah di Indonesia. UU tersebut membuka kesempatan untuk pengembangan jaringan perbankan Syari'ah oleh Bank Konvensional.

Selama kurun waktu perkembangan perbankan Syari'ah, tercatat akhir September 2002, jumlah kantor pusat bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) menjadi 8 pintu, 2 bank Syari'ah murni (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri), dan enam UUS (Bank Jabar Syari'ah, Bukopin Syari'ah, Bank Danamon Syari'ah, IFI Syari'ah dan BNI Syari'ah).

Sementara itu, jumlah kantor cabang pembantu serta SI kantor kas serta 83 BPRS.⁶⁴

4. Sistem Prosedur Operasional Produk Bank Syari'ah

Seperti bank konvensional, bank Syari'ah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana dengan unit lainnya yang kekurangan dana. Namun kegiatan dan penyaluran dana harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syari'ah yang berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits.

Pola Dana Bank Syari'ah

Penarikan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Al-Wadiah

Yaitu perjanjian antara pemilik barang atau uang dengan penyimpan sebagai pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut, tetapi tidak memperoleh imbalan atau keuntungan.

Ada dua jenis Wadi'ah yaitu :

- a) Wadi'ah Amanah adalah akad atau perjanjian penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperbolehkan menggunakan barang atau uang yang dititipkan, namun juga tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan atas barang yang

⁶⁴ Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan dengan prinsip syari'ah yang berstatus badan hukum koperasi simpan pinjam.

disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

- b) Wadi'ah Dhamanah adalah akad atau perjanjian penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan, dan harus bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan atas barang yang disimpan. Manfaat dan keuntungan menjadi hak penerima titipan.

Bank Syari'ah menggunakan atau memberikan jasa simpanan giro dalam rekening Wadi'ah. Nasabah yang membuka rekening giro berarti melakukan akad atau perjanjian Wadi'ah.

Dalam ahad tabungan bank Syari'ah menerapkan dua akad yaitu Wadi'ah dan Mudharabah. Dan dalam tabungan bank Syari'ah menerapkan akad Mudharabah mengikuti prinsip-prinsip Mudharabah.

Dasar hukum Wadi'ah antara lain termuat dalam Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا . النساء ٨٥ /

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ...”⁶⁵

Surat Al Baqarah ayat 283 :

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُم بِعَظْمٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ

⁶⁵ Dikutip dari Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 59-66

Artinya : “... *Jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, mala hendaklah yang dipercayai ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya...*”⁶⁶

b. Al Mudharabah

Yaitu perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha. Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Untuk jenis-jenis dan dasar hukum tentang Mudharabah sudah dijelaskan di atas.

Pola Penyaluran Dana Bank Syari’ah

Pola Penyaluran Dana yang telah dihimpun oleh bank Syari’ah harus dipersiapkan sebaik mungkin sesuai dengan tujuannya, yaitu :

- Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dengan tingkat resiko yang rendah.
- Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas tetap aman.⁶⁷

Penyaluran dana bank Syari’ah pada dasarnya dibagi dalam dua bagian penting,⁶⁸ yaitu :

- 1) Earning Asset (aktiva yang menghasilkan) adalah berupa investasi dalam bentuk :
 - a) Pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah)

⁶⁶ Al Qur'an dan Terjemahannya, *Loc-Cit*, hlm. 128

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 71

⁶⁸ Briefcase Book, *Loc-Cit*, hlm. 42

- b) Pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil dengan menyertakan (Musyarakah)
 - c) Pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli (al-ba'i)
 - d) Pembiayaan yang berdasarkan prinsip sewa (Ijarah)
 - e) Surat-surat berharga Syari'ah dan Investasi lainnya.
- 2) Non Earning Asset (aktiva yang tidak menghasilkan) yaitu berupa :
- a) Aktiva dalam bentuk tunai (Cash Asset)
 - b) Pinjaman (Qard)
 - c) Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris
1. Earning Asset
- a) Mudharabah

Mudharabah yang akan jelaskan di sini, sama dengan Mudharabah yang telah dijelaskan di atas, hanya saja pada pelaksanaannya nasabah sebagai shahibul maal dan bank sebagai pengelola dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola usaha. Dan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang menjadi bagian bank.

- b) Musyarakah

Musyarakah adalah akad antara dua orang atau lebih dengan menyetorkan modal dan dengan keuntungan dibagi menurut porsi yang disepakati.⁶⁹

⁶⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2003, hlm.

c) Bai' (prinsip jual beli)

Prinsip jual beli pada dasarnya dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya. Yang termasuk prinsip jual beli adalah :

(a) Bai' Mudharabah adalah bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Bai' Murabahah, penjual harus menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Margin keuntungan adalah selisih harga jual beli dikurangi harga asal yang merupakan pendapatan bank.

Syarat-syarat Bai' Mudharabah adalah :

- Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- Barang yang dijual belikan bukan barang ribawi.
- Penjual dan pembeli harus setuju dengan kadar untung atau tambahan harga yang ditetapkan tanpa ada paksaan.
- Apabila barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli yang pertama itu harus sah menurut hukum Islam.
- Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

(b) Bai' As Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, namun pembayaran dilakukan lebih dulu. Di sini bank bertindak sebagai pembeli, dan nasabah sebagai penjual. Ketika barang sudah diterima oleh bank, maka bank akan menjualnya kepada nasabah yang lain secara tunai maupun cicilan. Harga beli bank adalah harga pokok ditambah keuntungan.

Ketentuan umum Bai' Salam adalah

- Pembelian barang harus diketahui jenis, kualitas, macam, ukuran dan jumlahnya.
- Apabila barang yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan barang yang sesuai dengan pesanan.
- Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka dimungkinkan bagi bank melakukan salam kepada pihak ketiga.

d) Bai' Istishna' adalah akad jual beli barang antar pemesan dengan penerima pesanan. Bai' Istishna' ini merupakan suatu jenis khusus dari akad Bai' Salam. Biasanya jenis ini digunakan di bidang manufaktur. Maka ketentuan Bai' Istishna' mengikuti ketentuan aturan akad Bai' Salam.

Ketentuan umum pembiayaan Istishna' adalah :

- Spesifikasi barang pesanan harus jelas, jenis, macam, ukuran, mutu, maupun jumlahnya.

- Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dengan akad Istishna' dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

c. Ijarah

Ijarah adalah akad atau perjanjian pemindahan hak guna atas barang jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ketentuan umum akad Ijarah adalah :

- Transaksi Ijarah ditandai adanya pemindahan manfaat
- Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah.
- Harga sewa dan harga jual yang disepakati pada awal perjanjian antara bank dan nasabah.

Jasa Perbankan Syari'ah Lainnya

- (a) Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak untuk bertindak atau melaksanakan suatu tugas atau urusan atas nama pemberi kuasa sebagai pihak pertama.
- (b) Kafalah adalah akad menjadikan seseorang untuk ikut bertanggungjawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran utang. Beberapa jenis kafalah antara lain :
 - Kafalah bil Nafs, yaitu akad memberikan jaminan atas diri di penjamin.

- Kafalah bil Maal, yaitu jaminan pembayaran atau pelunasan utang.
 - Kafalah Mulaqah dan Munjazah, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu dan untuk tujuan tertentu.
 - Kafalah Bit Taslim yaitu penjaminan atas pengembalian barang sewa pada saat jangka waktu habis.
- (c) Hawalah adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hawalah ada tiga pihak yaitu pihak yang berhutang, pihak memberi hutang, dan pihak yang menerima pemindahan.
- (d) Jualah adalah suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip ini dapat diterapkan oleh bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil Fee (jasa) dari nasabah.
- (e) Rahn adalah menahan salah satu harta milik di peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut.
- (f) Qardh adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.
- (g) Sharf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Yang dimaksud pertukaran uang di sini adalah pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya.

Perbedaan Antara Bank Syari'ah dan Bank Konvensional

Pada dasarnya bank Syari'ah dan bank Konvensional memiliki banyak persamaan. Perbedaan yang paling mendasar terdapat pada prinsip operasionalnya saja yaitu bank Syari'ah menggunakan perangkat bagi hasil sedangkan di bank Konvensional menggunakan perangkat bunga. Secara umum perbedaan antara bank Syari'ah dan bank konvensional adalah :

Tabel 3.

Perbedaan Bank Syari'ah dan Bank Konvensional

	BANK SYARI'AH	BANK KONVENSIONAL
Prinsip operasional	Bagi hasil, jual beli, sewa	Berdasarkan bunga
Akad dan aspek legalitas	Hukum Islam dan hukum positif	Hukum positif
Investasi	Halal	Halal dan Haram
Struktur organisasi	Ada Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)	Tidak ada DSN dan DPS
Tujuan	Profit dan Falah Oriented	Profit Oriented
Operasional	<ul style="list-style-type: none">- Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu- Penyaluran dana pada usaha yang halal dan menguntungkan	<ul style="list-style-type: none">- Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo- Penyaluran dana pada sektor yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama
Lembaga penyelesaian sengketa	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Aspek sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi	Tidak diketahui secara tegas
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitur Kreditur

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

1. Bank Muamalat Indonesia

Sistem dan Perhitungan bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*), dilihat dari sudut pandang nasabah sebagai investor, terbagi menjadi :

- Mudharabah Muqayyadah of Balance Sheet
- Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet
- Mudharabah Mutlaqoh

Dilihat dari sudut pandangan Bank, dibagi antara lain :

- Perhitungan Saldo Akhir Bulan
- Perhitungan Saldo Rata-rata Harian

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil antara lain ditentukan oleh :

- Pendapatan Bank
- Nisbah bagi hasil antara nasabah dan Bank
- Nominal deposito untuk jangka waktu yang sama pada Bank

Ketentuan menghitung bagi hasil, harus diketahui komponen-komponen, yaitu antara lain :

- Jenis simpanan / deposito / giro (kolom 0)
- Saldo rata-rata harian perbulan (kolom 1)
- Bobot simpanan (kolom 2)
- Porsi saldo (kolom 3)

- Distribusi pendapatan (kolom 4)
- Porsi bagi hasil deposan (kolom 5) dan (kolom 7)
- Pendapatan deposan (kolom 6) dan pendapatan bank (kolom 8)

Tabel 4

DISTRIBUSI PENDAPATAN (BAGI HASIL)

Jenis Produk	Rata-rata sebulan saldo harian	Bobot	Saldo rata-rata tertimbang	Distribusi	Distribusi			
					Penyimpan dana		Bank	
					Porsi	Pendapatan	Porsi	Pendapatan
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(A)	(B)	(A)x(B)=(C)	(D)	(E)	(F)=(D)x(E)	(G)	(H)=(D)x(G)
Rekening Giro	1.000.000	0,700	7.000.000	D1		F		H1
Rekening Tabungan	60.000.000	1,000	60.000.000	D2	0,51	F2	0,49	H2
Deposito Mudharabah 1 bulan	10.000.000	0,800	8.000.000	D3	0,58	F3	0,42	H3
3 bulan	20.000.000	0,850	1.700.000	D4	0,59	F4	0,41	H4
6 bulan	5.000.000	0,900	4.500.000	D5	0,60	F5	0,40	H5
12 bulan	10.000.000	1,000	10.000.000	D6	0,60	F6	0,40	H6
Grand Total	115.000.000	(B)	106.500.000	(D)		(F)		(H)

Sumber : Short Course Bank Syari'ah (BMI)

Keterangan : $D1 = C1 / \text{Grand Total C} \times \text{Grand Total D}$. dst.

Bobot = $1 - (\text{GWM} + \text{Excess Reverse} + \text{Foating})$

PERHITUNGAN BAGI HASIL POLA

BARU



Kelebihan cara ini :

- Penyertaan dana Shohibul Maal dalam investasi dikoreksi dengan GMW
- Bobot dihilangkan / diseragamkan = 1
- Cara perhitungan relatif lebih rendah
- Mempermudah perencanaan
- Penggunaan ekuivalent rate hasil investasi per-Rp. 1000 dana nasabah

Tabel 5

DISTRIBUSI PENDAPATAN BAGI HASIL POLA BARU

Jenis Produk	Rata-rata sebulan saldo harian	Bobot	Saldo rata-rata tertimbang	Distribusi	Distribusi			
					Penyimpan dana		Bank	
					Porsi	Pendapatan	Porsi	Pendapatan
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(A)	(B)	$(A) \times (B) = (C)$	(D)	(E)	$(F) = (D) \times (E)$	(G)	$(H) = (D) \times (G)$
Rekening Giro	A1	1,00	C1	D1		F		H1
Rekening Tabungan	A2	1,00	C2	D2	51,00	F2	49,00	H2
Deposito Mudharabah 1 bulan	A3	1,00	C3	D3	58,00	F3	42,00	H3
3 bulan	A4	1,00	C4	D4	59,00	F4	41,00	H4
6 bulan	A5	1,00	C5	D5	60,00	F5	60,00	H5
12 bulan	A6	1,00	C6	D6	60,00	F6	60,00	H6
Grand Total	(A)	1,00	(C)	(D)		(F)		(H)

Menghitung Saldo Rata-rata Harian

Saldo rata-rata harian untuk jenis produk funding dimaksud Syari'ah ditentukan sebagai berikut :

1. Menentukan tanggal berapa keuntungan yang diperoleh dari penempatan dana akan dibagihasilkan. Misalnya setiap bulan ditentukan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan, maka pendapatan yang akan dibagihasilkan kepada penyimpan dana adalah pendapatan yang diperoleh sejak tanggal 26 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 25 pada bulan di mana pendapatan tersebut dibagihasilkan.
2. Jumlah hari yang dihitung dalam satu bulan adalah sesuai dengan hitungan kalender. Oleh karena itu, saldo rata-rata harian perbulan dihitung sejak tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya.

Contoh, apabila tabungan Mudharabah karta tabungannya menunjukkan transaksi sebagai berikut :

Tabel 6

CONTOH TABUNGAN MUDHARABAH

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo
26 – 06 – 2005		575.000	575.000
02 – 07 – 2005	125.000		450.000
10 – 07 – 2005		250.000	700.000
15 – 07 – 2005	100.000		600.000
21 – 07 – 2005		400.000	1.000.000

Hitungan saldo rata-rata harian per bulan pada tanggal 25 Juli 2005, sebagai berikut :

1. Tanggal	26-6-2005	s/d	1-7-2005	=	6 hari x 575.000	=	3.450.000
2. Tanggal	2-6-2005	s/d	9-7-2005	=	8 hari x 450.000	=	3.600.000
3. Tanggal	10-6-2005	s/d	14-7-2005	=	5 hari x 700.000	=	3.500.000
4. Tanggal	15-6-2005	s/d	20-7-2005	=	6 hari x 600.000	=	3.600.000
5. Tanggal	21-6-2005	s/d	25-7-2005	=	5 hari x 1.000.000	=	<u>3.500.000</u>
Jumlah				=	30 hari		19.150.000

$$\text{Saldo rata-rata harian} = 19.150.000 / 30 = 638.333$$

- Cara perhitungan di atas, juga digunakan untuk menghitung jenis simpanan yang lain.
- Jika terjadi penutupan rekening, maka saldo rata-rata untuk dihitung adalah sejak tanggal 26 sampai penutupan rekening tersebut, kemudian dihitung berapa bagi hasilnya.

Apabila Bank Syari'ah mampu mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK) sebanyak Rp. 90.000.000, DPK yang dapat disalurkan pada pembiayaan sebanyak Rp. 85.500.000 (karena ada giro Wadiah minimum sebesar 5 %). Pembiayaan yang harus disalurkan ke masyarakat sebanyak Rp. 100.000.000. dari pembiayaan seratus juta diperoleh pendapatan dari pembiayaan sebesar Rp. 6.000.000. Nisbah bagi hasil 51 % : 49 %. Saldo rata-rata harian dana nasabah sebesar Rp. 1.000.000. Berapa pendapatan bagi hasil setiap Rp. 1.000 dana nasabah ?

DPKM (Dana pihak ketiga Mudharabah) yaitu Dana Nasabah dengan Akad Mudharabah	A	90.000.000
DPKM yang dapat disalurkan pada pembiayaan = DPKM (1-GMW = simpanan wajib pada Bank Indonesia = 5 %	B	85.500.000
Dana Bank		14.500.000
Pembiayaan yang disalurkan	C	100.000.000
Pembiayaan dari penyaluran pembiayaan	D	1.666.667
Pendapatan investasi dari setiap 1000 DPKM	E	15,83

$$E = \frac{B}{C} \times D \times \frac{1}{4} \times 1.000$$

Contoh :

Nasabah memiliki deposito Mudharabah sebesar Rp. 10.000.000 dengan Nisbah nasabah 51 dan Bank 49, dan masa pendapatan selama 1 bulan.

Pendapatan Investasi dari setiap 1000 DPKM	E	15,83
Saldo rata-rata harian	F	10.000.000
Nisbah nasabah (disepakati awal akad)	G	51,00
Porsi bagi hasil untuk nasabah bulan ini (Rupiah)	H	80.733,00

$$H = \frac{F}{1.000} \times E \times \frac{G}{100}$$

Dari hasil perhitungan di atas ditemukan pendapatan nasabah untuk bulan ini dengan dana sebesar Rp. 10.000.000, bagi hasilnya sebesar Rp. 80.733,-

Apabila Nasabah memiliki deposito di bank Konvensional sebesar 10 juta dengan bunga / tahun 9,50 maka selama 1 bulan pendapatan yang diperoleh Nasabah adalah

$$10.000 \times \frac{9,50}{365 \times 30}$$

$$= 78.082$$

2. Bank BRI Syari'ah

Perhitungan Equivalen Rate (ER) bagi hasil dan bonus atas simpanan kanca BRI pertahun :

AA.	Giro Waidah	: 1.50 %
BB1.	Tabungan Mudharabah	: 6.01 %
BB2.	Tabungan Haji Mudharabah	: 2.05 %
CC1.	Deposito Mudharabah Nisbah 58 %	: 7.41 %
CC2.	Deposito Mudharabah Nisbah 59 %	: 7.54 %
CC3.	Deposito Mudharabah Nisbah 60 %	: 7.67 %
CC4.	Deposito Mudharabah Nisbah 61 %	: 7.80 %
CC5.	Deposito Mudharabah Nisbah 62 %	: 7.92 %
CC6.	Deposito Mudharabah Nisbah 63 %	: -
CC7.	Deposito Mudharabah Nisbah 65 %	: 8.31 %
CC8.	Deposito Mudharabah Nisbah 66 %	: 8.40 %

CC9. Deposito Mudharabah Nisbah 67 % : 8.56 %

CC10. Deposito Mudharabah Nisbah 68 % : 8.69 %

Ketentuan Equivalen Rate (ER) tersebut kemudian dimasukkan melalui menu pinca, yaitu sebagai berikut :

1. Aplikasi Olsib, Pemel, tabel Aplikasi, tabel tabungan untuk ER tabungan.
2. Aplikasi Olsib, Pemel, tabel Aplikasi, tabel giro untuk bonus giro.
3. Aplikasi Olsib, Pemel, tabel Aplikasi, tabel ER Deposito untuk ER Deposito.

Ketentuan tersebut berlaku untuk perhitungan ER sampai dengan akhir bulan saja.

Ilustrasi Bagi Hasil Bank BRI Syari’ah

No.	Jenis Simpanan	Saldo Rata-rata	Pendapatan dibagikan	ER sebelum dibagikan	Nasabah		Return	
					Nisbah	Pendapatan	Per 1 jt	(% P.A)
1	2	3	4 = (3/TTL.3)x Pendapatan	5	6	7 = 5x4	8 = $\frac{7}{3}$ x 1 jt	9
1	Giro Wadiah	11.113.285.664	120.639.692	12,78	0,00	14.158.021	1.273,97	1,50
2	Tabungan Mudharabah	62.279.382.760	676.070.587	12,78	47,00	317.753.176	5.102,06	6,01
3	Tabungan Haji Mudharabah	3.213.484.009	34.883.808	12,78	16,00	5.581.409	6.736,87	2,05
4	Deposito Mudharabah Nisbah 58 %	43.377.781.427	470.885.241	12,78	58,00	273.113.440	6.296,16	7,41
5	Nisbah 59 %	27.997.877.501	303.929.497	12,78	59,00	179.318.403	6.404,71	7,54
6	Nisbah 60 %	2.280.640.161	24.757.242	12,78	60,00		6.621,82	7,54
7	Nisbah 61 %	42.281.505.374	458.984.674	12,78	61	284.570.491	6.730,380	7,60
8	Nisbah 62.5 %			12,78	62,50			
9	Nisbah 63 %			12,78	63,00			
10	Nisbah 65 %	43.600.000.000	473.297.523	12,78	65,00	307.643.390	7.056,04	8,31
11	Nisbah 66 %	5.690.322.581	61.771.000	12,78	66,00	40.768.860	7.164,60	8,44
12	Nisbah 67 %	16.376.849.463	177.778.034	12,78	67,00	119.111.283	7.273,15	8,56
13	Nisbah 68 %	9.096.774.193	96.749.557	12,78	68,00	67.149.699	7.381,70	8,69

Cara perhitungan bagi hasil untuk nasabah :

- Bagi hasil kotor = Saldo rata x % ER x 31 / 365 = Rp. AA
- Zakat (apabila ada) = Rp. AA x % Zakat = Rp. BB
- Bagi hasil setelah Zakat = Rp. AA – Rp. BB = Rp. CC
- Pajak (20 %) = Rp. CC x 20 % = Rp. DD
- Bagi Hasil Netto = Rp. CC – Rp. DD = Rp. EE

Contoh :

Apabila seorang nasabah mempunyai tabungan Mudharabah dengan saldo awal atau saldo bulan yang lalu sebesar Rp. 14.542.598,-. Kemudian pada tanggal enam bulan berikutnya sebesar Rp. 13.542.598,- dan tanggal dua puluh empat mempunyai saldo sebesar Rp. 17.412.598,-, dan diketahui ER bank adalah 6.13, maka hasil yang diterima sanabah adalah sebagai berikut :

- I. $5 \times 14.524.598 = 72.712.990$
- II. $18 \times 13.542.598 = 243.766.760$
- III. $\frac{7}{30} \times 17.412.598 = \underline{121.888.186}$
 $438.367.940$

Saldo rata-rata : $438.367.940 : 30 = 14.612.264.6$

Maka bagi hasil adalah : $14.612.265 \times 6.13 \times \frac{30}{365} = 73.621$

Jadi bagi hasil yang diterima nasabah adalah sebesar Rp. 73.621,-

Apabila nasabah menabung di bank konvensional maka perhitungan bunga yang diambil adalah saldo terakhir dari tabungan tersebut. Jadi apabila nasabah mempunyai tabungan dengan saldo akhir sebesar Rp. 17.512.598,00 bunga yang diterima oleh nasabah adalah :

$$\text{Saldo akhir} \times \frac{6.00}{365 \times 30} = \text{bunga} - \text{pajak}$$

$$17.512.598 \times \frac{6.00}{365 \times 30} = 85.870,00$$

Jadi bunga yang diterima nasabah sebelum dikurangi pajak adalah Rp. 85.870,00

$$\frac{\text{Nilai Deposito}}{\text{Saldo rata-rata Deposito Syari'ah Mandiri 1 bulan}} \times \frac{\text{Saldo pendapatan Distribusi bagi hasil seluruh deposito 1 bulan}}{\text{Nisbah}}$$

Contoh :

Diketahui seorang nasabah mempunyai Deposito dengan jangka waktu 1 bulan sebesar Rp. 10.000.000,-. Dan saldo rata-rata bank dengan jangka waktu 1 bulan adalah Rp. 1.351.673.504.10. dan pendapatan distribusi bagi hasil seluruh Deposito Syari'ah jangka waktu 1 bulan adalah Rp. 12.322.051.168.26.

Sedangkan nisbah bagi hasil Deposito Syair'ah Mandiri untuk nasabah dalam jangka waktu 1 bulan adalah 58.00 %. Maka bagi hasil yang diterima nasabah adalah :

$$\frac{10.000.000}{1,351.673.428.504.10} \times 12.322.051.168.26 \times 58,00 \% = 52.873,64$$

dan di Bank Konvensional penghitungan bunga adalah

$$\text{saldo akhir} \times \frac{\text{suku bunga per tahun}}{365 \times \text{jumlah hari dalam bulan}}$$

jadi jumlah bunga yang diterima oleh nasabah adalah

$$10.000 \times \frac{9,50 \%}{365 \times 30} = 78.082$$

Dari perhitungan bagi hasil (tabungan) tersebut di atas dapat diketahui bahwa :

- Sistem bagi hasil tidak dapat memastikan keuntungan di muka, karena harus memperhitungkan hasil investasi.

- Secara finansial tidak ada kepastian sistem bagi hasil lebih besar atau lebih kecil dan sebaliknya, tergantung pada indeks hasil investasi dari bank yang bersangkutan.
- Perhitungan dengan sistem bunga terlihat lebih ringkas.

Penentuan Nisbah Pembiayaan

Nisbah bagi hasil dihitung berdasarkan profit sharing, unsur-unsur yang terdapat dalam perhitungan nisbah bagi hasil antara lain adalah

- Volume penjualan
- Profit Margin
- Lama piutang
- Lama persediaan
- Lama hutang dagang
- Cash to cash periode
- Profit Margin per tahun
- Nisbah bank
- Nisbah untuk nasabah

Contoh :

Nisbah bagi hasil dihitung berdasarkan profit sharing dari usaha pengadaan kacang kedelai yang dibiayai dengan fasilitas Mudharabah dengan data sebagai berikut :

Harga jual kacang kedelai = Rp. 2.150 / kg

Harga jual kepada nasabah	= Setara 16 % p.a
Volume penjualan kedelai per bulan	= 65.000 kg
Nilai penjualan (65.000 x Rp. 2.150)	= Rp. 139.750.000
Harga pokok pembelian	= <u>Rp. 125.000.000</u>
Laba bersih penjualan	= Rp. 14.750.000

Perhitungan Nisbah :

Volume penjualan	= 65.000 kg
Profit Margin (Rp. 14.750.000 / 139.750.000) x 100 %	= 10,55 %
Lama piutang	= 65 hari
Lama persediaan	= 2 hari
Lama hutang dagang (pembayaran ke Suplier & carry)	= 0
Cash to cash periode = 360 / (DI +DR – DP)	= 5,4
Profit Margin per tahun	= 57 %
Nisbah bank Syari'ah : (16 %) / (57 %) x 100 %	= 28 %
Nisbah untuk nasabah : 100 % - 28 %	= 72 %

Contoh perhitungan bagi hasil pembiayaan

Seorang nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja sebesar Rp. 100.000,000 selama 1 tahun, dengan perbandingan bagi hasil antara nasabah dan bank 60 : 40 %, cara berhitungnya adalah sebagai berikut :

Tabel 9**MEKANISME PENYELESAIAN PENGHITUNGAN PEMBIAYAAN**

Bulan	Laba Usaha	Bagian Bank 40 %	Bagian Nasabah 60 %	Cicilan Pokok	Total Setoran
1.	6.000.000	2.400.000	3.600.000		2.400.000
2.	7.000.000	2.800.000	4.200.000		2.800.000
3.	4.000.000	1.600.000	2.400.000		1.600.000
4.	4.500.000	1.800.000	2.700.000		1.800.000
5.	5.000.000	2.000.000	3.000.000		2.000.000
6.	5.500.000	2.200.000	3.300.000		2.200.000
7.	6.000.000	2.400.000	3.600.000		2.400.000
8.	5.400.000	2.160.000	3.240.000		2.160.000
9.	9.000.000	3.600.000	5.400.000		3.600.000
10.	5.700.000	2.280.000	3.420.000		2.280.000
11.	4.700.000	1.880.000	2.820.000		1.880.000
12.	3.500.000	1.400.000	2.100.000	100.000.000	1.400.000
Total	66.300.000	26.520.000	39.780.000	100.000.000	126.520.000
% Dari Hasil Usaha		0.40	0.60		

Sumber : Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Pembiayaan bagi hasil mekanisme penghitungannya adalah sebagai berikut :

Pembiayaan Bank : Rp. 100.000.000,-

Ekspektasi keuntungan bank : Rp. 20 % / tahun

Proyeksi penjualan : Rp. 45.000.000,- / tahun

Jangka waktu : 1 tahun

Perhitungan Nisbah :

Ekspetasi Margin : Rp. 100 juta x 20 % = Rp. 20 juta %

Nisbah Bank Rp. 20 juta / 45.000.000 = 44,44 %

Nisbah Nasabah 100 % - 44,44 % = 55,56 %

Pokok Rp. 100 juta dikembalikan pad bulan ke-12

Dalam Bank Konvensional penghitungan bunga kredit / pinjaman adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Bunga} &= \frac{\text{Pinjaman} \times \text{Hari} \times \text{Tingkat Suku Bunga}}{360 \times 100} \\ &= \frac{100.000.000 \times 30 \times 1.5}{360 \times 100} \\ &= 861111 \times 0.015 = 1.291.660 \\ &= 1.2916,665\end{aligned}$$

Menentukan profit Margin

Harga jual Bank = Harga Beli Bank + Cost Recovery + Keuntungan

Cost Recovery =

$$\frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Target Volume pembiayaan}} \times \text{Proyeksi Biaya Operasi}$$

$$\text{Margin dalam \%} = \frac{\text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan}}{\text{Harga Beli Bank}} \times 100 \%$$

ANALISA

Dasar utama pendirian bank Syari'ah di Indonesia adalah untuk berusaha sebisa mungkin beroperasi sebagai sebuah bank perniagaan bank yang berlandaskan kepada hukum-hukum Islam, untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan jasa-jasa bank kepada semua umat Islam dan rakyat di negeri ini, dengan mencapai keteguhan dan upaya untuk berkembang dari waktu ke waktu.

Suatu intisari dari operasi Bank Islam yang berlandaskan hukum-hukum Islam adalah pelaksanaan **Muamalat Urusan Bank dan Keuangan Tanpa Riba**. Menurut ulama-ulama yang berusaha dalam gerakan mendirikan Bank Syari'ah, pencapaian dasar ini adalah wajar diutamakan dalam kegiatan sebuah Bank Syari'ah. Sebagai pengganti pengganti pembayaran dan pemberian bunga seperti yang dilakukan oleh sistem bank yang ada sekarang, sistem bank Syari'ah melalui hukum-hukum yang akan diterangkan nanti, mengutamakan perbuatan berkongsi bagi hasil (profit and loss sharing) yang lebih menjamin keadilan sosial dalam pemberian untung-rugi kepada nasabah, peminjam dan pemilik saham bank.¹

Untuk memperkenalkan dan mengamalkan sistem Bank Syari'ah ini, semua Bank Syari'ah yang didirikan, terutama Bank Muamalat Indonesia (BMI), sewajarnya berusaha sebisa mungkin supaya dapat berdiri dengan kokoh dan berupaya untuk berkembang mengenalkan diri kepada masyarakat luas dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, ukuran inilah yang akan digunakan oleh semua

¹ Hamid Basyaib, *Bank Tanpa Bunga*, Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 1993, hlm.1-30

pihak untuk menilai kemampuan hukum dan peraturan syari'ah, serta kebolehan umat Islam sebagai suatu alternatif dalam sistem yang ada sekarang.²

Cara perhitungan di atas dapat diketahui, bahwa cara perhitungan Bank Konvensional lebih sederhana dari Bank Syari'ah dan dalam hal setoran Bank Syari'ah terlihat lebih mahal dari Bank Konvensional. Itu yang membuat masyarakat kecewa atau setidaknya bingung ketika berhadapan dengan kenyataan bahwa Bank Syari'ah memiliki produk yang lebih mahal jika dibandingkan dengan Bank Konvensional. Jika Bank Syari'ah lebih mahal, berarti bagi hasil akan sama saja atau malah lebih buruk daripada bunga.

Sistem bunga maupun sistem bagi hasil bukan hanya masalah untung atau rugi melainkan juga masalah benar atau salah. Hukum Islam memang menyatakan bahwa riba adalah hal yang terlarang dan haram hukumnya. Salah satu ayat yang mengharamkan riba adalah terdapat dalam Surat Al Baqarah ayat 275, yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَادْتَمَسْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

² Ibid

Artinya : *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada-Nya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya,” (Al Baqarah : 275)³*

Dalam ayat Al Qur'an tersebut di atas menerangkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya sangat jelas bahwa memang dilarang dalam Al Qur'an dan tidak perlu diklarifikasi lagi. Jadi bahwa modal dasar yang harus diambil oleh nasabah maupun bank, bagaimanapun keadaannya, pemberi pinjaman tidak berhak untuk menerima apapun selain jumlah modal.

Meskipun keputusannya jelas bahwa riba haram, namun hukum Islam tidak jelas atau belum mengklaim bahwa bunga bank tersebut haram. Dan riba yang dimaksud oleh ayat di atas riba Nasi'ah yang berlipat ganda dan umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. Jadi kalau disesuaikan pada

³ Al Qur'an dan Terjemahannya, Madinah Arab Saudi : 1412 H, Muja'mma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mush-haf Asy-Syarif, hlm. 69

zaman sekarang, riba yang diharamkan adalah riba pada bunga yang dilakukan oleh rentenir yang terjadi dalam masyarakat secara tidak terkontrol oleh hukum atau perundang-undangan yang berlaku, sedangkan suku bunga bank besarnya sudah diatur oleh pemerintah dan sudah dilakukan penelitian berdasarkan kekuatan ekonomi masyarakat.

Dalam Fiqh Muamalah dikenal prinsip “Asal dari segala sesuatu hukumnya boleh sampai terdapat petunjuk atau dalil yang melarangnya. Berdasarkan prinsip ini kemudian para ahli berkesimpulan bahwa transaksi-transaksi ekonomi yang dikembangkan masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang apapun bentuknya hukumnya boleh sepanjang tidak ditemukan dalil yang tegas-tegas melarangnya. Sehingga ketika dihadapkan kepada mereka suatu peristiwa hukum dalam konteks Muamalah, sikap yang ditunjukkan bukan menjauhi melainkan bekerja keras untuk menemukan ketentuan hukumnya.

Prinsip di atas merupakan bukti lenturnya hukum Islam yang terlihat jelas dalam lapangan Muamalah, yang merupakan bagian terpenting yang membuktikan adanya maksud pembuat hukum memberi konsensi-konsensi bagi manusia dalam mengembangkan hukum berdasarkan kemajuan zaman. Namun konsensi-konsensi yang diberikan hukum Islam tersebut bukan berarti melemahkan atau mengaburkan rambu-rambu yang telah ditetapkan, tidak menghalalkan yang dilarang, dan tidak melarang apa yang telah dihalalkan oleh agama.

Menurut para ahli hukum Islam bahwa di samping transaksi-transaksi lain yang dilarang karena hal-hal non-ribawi, sebagai berikut :

Terdapat di dalamnya unsur penipuan.

Terdapat di dalamnya unsur ketidakjelasan (gharar), seperti menjual buah-buahan yang belum nyata baiknya, atau seperti menjual anak kambing yang masih di dalam kandungan. Gharar juga terjadi apabila dua orang bersepakat untuk bekerja sama atas suatu proyek tertentu dengan biaya bersama namun salah satu pihak menolak menentukan porsi bagi hasil untuk keduanya.

Terdapat di dalamnya unsur paksaan, seperti seseorang tanpa memaksa orang lain untuk menjual barang miliknya.

Terdapat di dalamnya unsur rekayasa terhadap sesuatu yang haram agar terlihat seakan-akan halal, seperti menyebutkan imbalan jasa untuk kelebihan harta atas pokok pinjaman yang dipersyaratkan oleh orang yang memberi hutang.

Terdapat di dalamnya unsur kecurangan, seperti menghadang atau menghalangi pedagang yang akan menjual barangnya agar mau menjual dagangannya kepadanya dengan tujuan untuk mendapatkan untung besar. Kecurangan ini terjadi apabila penjual tidak tahu harga pasar.

Terdapat di dalamnya unsur kesengajaan seseorang dalam menciptakan kelangkaan barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga berakibat harga melambung dan keuntungan besar berpihak kepadanya.

Terdapat di dalamnya pengertian menempatkan suatu barang untuk dua kali (macam) akad.

Terdapat di dalamnya unsur tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat.

Menarik minat pembeli (berpromosi) dengan melakukan propaganda bohong dan sebagainya.⁴

Dari hal-hal tersebut di atas dikethau bahwa tidak boleh karena sikap hati-hatinya kemudian mudah mengharamkan yang sebenarnya dihalalkan atau sesuatu yang belum jelas hukumnya. Begitupun sebaliknya tidak boleh seseorang karena ingin menjunjung tinggi kebebasan kemudian mudah menghalalkan sesuatu yang sebenarnya dilarang agama atau sesuatu yang belum jelas hukumnya.

Hukum Islam statusnya sebagai sebuah keagamaan dalam masalah ekonomi. Sebagai besar negeri Islam telah mengatur atau menyetujui, peran bunga dalam perekonomian / perbankan, dan membolehkan pembayaran bunga.⁵ Karena pemerintah telah menetapkan batas suku bunga maksimalnya. Meskipun praktek ini berjalan Syari'at-pun tetap tidak menerimnya dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) memberikan fatwanya bahwa bunga bank haram. Namun, dalam segalabentuknya konsep perbankan Islam yang telah dipraktekkan ini dibangun dengan interpretasi riba yang sempit.

Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya sejak semula Islampun mengakui adanya motif laba (profit / keuntungan) dalam kegiatan usaha. Namun

⁴ Dikutip dari Makhalul Ilmi SM.s, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 26-28

⁵ Latifa M. Al Gadud dan Meruyn K. Lewis (Penerjemah Burhan Wirasubrata), *Perbankan Syari'ah (Prinsip, Praktek, Prospek)*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003, hlm. 63

motif tersebut terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri. Karena batasan-batasan itu, maka jika ajaran Islam dilaksanakan dalam kegiatan usaha. Namun motif tersebut terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial, dan pembatasan diri. Karena batasan-batasan itu, maka jika ajaran Islam dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi, pemakaian laba atau keuntungan tidak akan membawa manusia pada individualisme yang ekstrim yang hanya mengingat kepentingan sendiri tanpa mempedulikan kepentingan-kepentingan masyarakat.

Dengan melarang riba, Islam membangun sebuah masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan. Suatu pinjaman memberikan kepada si peminjam sejumlah keuntungan yang pasti, dengan tidak mempedulikan hasil usaha si peminjam. Dapat dikatakan adil apabila sama-sama menanggung keuntungan dan kerugian. Pembagian keuntungan adalah sah dari praktek pengembangan perbankan Syari'ah. Dalam Islam, pemilik modal dihasilkan oleh pelaksana usaha.

Menurut Sayyid Sabiq bahwa keuntungan itu hendaknya dibagi diantara pemilik modal :

Artinya : *“Hendaklah keuntungan / laba yang diperoleh dibagi diantara pengelola (Mudharib) dan pemilik modal sesuai dengan nisbah yang disepakati.*

Keuntungan yang diperoleh nasabah biasanya lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh Bank. Karena pada dasarnya semua keuntungan adalah nasabah yang telah mengusahakan modalnya untuk dikelola dana oleh bank sehingga mendapatkan keuntungan. Dan karena Bank mengelola dana dari nasabah dengan tujuan investasi serta berada dalam keuntungan, maka bank juga berhak mendapatkan keuntungan, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini dapat diterima, karena kesepakatan adalah perkara yang jelas yang dibolehkan dalam Islam, dan bukan perkara yang diragukan hasilnya. Inilah yang menjadikan bank Syari'ah lebih oleh masyarakat muslim karena sistemnya di awal perjanjian.

Meskipun yang harus dibayar oleh nasabah lebih ringan dan lebih murah, namun itu tetap dapat diterima oleh Hukum Islam karena diantara nasabah dan bank telah melakukan kesepakatan di awal perjanjian tentang nisbah bagi hasil baik itu rugi maupun untung, sementara sistem bunga tidak dibenarkan oleh Islam karena yang ditetapkan sebelumnya adalah keuntungan saja.

Dengan dilarangnya penggunaan suku bunga dalam transaksi keuangan, bank-bank Syari'ah diharapkan untuk menjalankan operasinya hanya berdasarkan pola Profit and Loss Sharing. Menurut hukum perniagaan Islam, kemitraan dan semua jenis usaha didirikan terutama dengan satu tujuan yaitu pembagian keuntungan melalui partisipasi bersama.

Dalam Bank Syari'ah apabila hasil usaha nol maka tidak ada bagi hasil, artinya nasabah dan bank tidak mendapatkan keuntungan. Apalagi rugi, maka

bank akan menutup kerugian tersebut dan nasabah tidak mendapatkan bagi hasil. Namun bank akan tetap menyelidiki sebab-sebab kerugian, apalagi kerugian disengaja atau kelalaian oleh nasabah, maka nasabah tetap harus menanggung kerugian. Dalam pembiayaan musyarakah apabila terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung bersama berdasarkan porsi modal yang disepakati bersama.

Selain Surat Al Baqarah di atas, pelarangan riba juga terdapat dalam Ayat-ayat di bawah ini, Antara lain:

Surat Al-Baqarah ayat 278-279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ
رُعُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. / البقرة ٢٧٩

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. (Al-Baqarah, ayat 278-279).

Surat Ali-Imran ayat 130-131 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kanu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.*” (Ali Imran, ayat 130-131.)

Surat An Nisa’ ayat 160-161 :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : “*Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dari karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka mamakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka-mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.*” (An Nisa’, ayat 160-161)

Surat Ar-Rum ayat 39 :

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya : *“Maka sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*
(Ar Rum, ayat 39)

Dengan memperhatikan ayat-ayat di atas, ada ayat yang secara tegas mengharamkan riba. Ada juga yang memang tegas melarangnya, tapi masih berupa gambaran umum dan belum mencakup secara keseluruhan. Dari ayat di atas juga terlihat ada tahapan-tahapan pelarangan riba seperti tahapan pelarangan minuman, dengan kata lain Al Qur'an menggunakan cara yang bertahap, berangsur-angsur dalam pelarangan riba, Al Qur'an tidak secara langsung menilai hukumnya haram, tetapi menggunakan teori bertahap dan berangsur sedikit demi sedikit. Konsep riba tidak terbatas pada bunga. Dikenal dua bentuk riba dalam hukum Islam. Yaitu riba *al qarud* yang berhubungan dengan tambahan atas pinjaman, dan riba *al buyu* yang berhubungan dengan tambahan atas jual beli. Riba *al buyu* ada dua bentuk yakni riba *al fadl* yang meliputi penukaran secara bersamaan dari komoditas yang sama yang memiliki kualitas atau kuantitas yang tidak sama dan riba *annasiyah* yang meliputi penukaran yang tidak bersamaan dari komoditas yang sama yang memiliki kuantitas dan kualitas yang sama. Pelarangan berlaku bagi objek-objek yang dapat diukur atau ditimbang dari jenis yang sama. Kelebihan dalam kuantitas maupun penundaan dalam pelaksanaan, dua-duanya dilarang.

Riba *al qarud*, bunga pinjaman, meliputi beban atas pinjaman yang bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Dengan kata lain merupakan

pinjaman berbunga. Riba ini muncul apabila peminjaman harta orang lain oleh si pemberi pinjaman untuk membayar suatu tambahan tertentu di samping pokok pinjaman pada saat pelunasan. Jika tambahan itu ditetapkan sebelumnya pada awal transaksi sebagai suatu jumlah tertentu, dengan cara bagaimanapun pertambahan ini terjadi, maka pinjaman itu menjadi pinjaman ribawi.⁶

Persoalan apakah bunga indentik dengan riba sehingga hukumnya haram ataukah tidak, sehingga hukumnya tidak haram (halal) itu sendiri masih jadi persoalan dan perdepatan panjang yang belum selesai diantara kalangan para ulama sendiri. Hingga saat ini masih terdapat tiga macam pendapat (fatwa) mengenai bunga atas pinjaman atau tabungan. Ada yang menilai bunga sama dengan riba sehingga hukumnya haram mutlak. Ada pula yang menilai sebaliknya yaitu halal karena tidak sama dengan riba, melainkan itu cara mengambil keuntungan sebagaimana orang mencari untung dalam jual beli. Disamping itu ada yang menilai sebagai sesuatu yang masih belum pasti (*subhat*).

Setelah MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa bunga adalah riba, sehingga seolah-olah fatwa tentang pembungaannya menjadi tunggal dan monolitik, tidak seperti fatwa yang disampaikan sebelumnya yang lebih beragam dan majemuk.

⁶ Muchammad Parmudi, *Sejarah Dan Doktrin Bank Islam*, Yogyakarta: Kutub, 2005, hlm. 25-26

Menurut Umar Vadillo,⁷ struktur dan wilayah kerja Bank Syari'ah berdasarkan suatu kontrak, fluktuasi harga yang muncul berpengaruh pula terhadap transaksi yang dilakukan bank. Akibatnya, semua kontrak yang dilakukan oleh Bank Syari'ah adalah riba karena kurang atau tidak adanya pemisahan secara penuh dari sistem secara umum.

Jadi kontrak / akad atau perjanjian yang dilakukan oleh Bank Syari'ah sudah mengandung sifat riba karena nilai-nilai salah satu dari komoditas yang diperdagangkan adalah uang kertas, yang bertambah jumlahnya karena ada tekanan dan paksaan serta monopoli perbankan negara.

Pinjaman untuk suatu komoditas yang mudah terpengaruh devaluasi lalu nilainya menguat ketika diterima, berarti penguatan itu adalah riba. Jadi secara umum, pinjaman tidak boleh berupa komoditas yang nilainya mudah berubah, termasuk uang, karena uang kertas tidak dapat dipakai sebagai komoditas nilainya stabil. Akan tetapi jika terjadi devaluasi di luar perkiraan, pembayaran kompensasi yang setara dengan nilai devaluasi komoditas yang dipinjamkan harus ditetapkan dan hal ini tidak dapat disamakan dengan riba.

Sistem bagi hasil dalam bentuk paroan / memaro dan lain-lain dalam bidang pertanian, peternakan dan sebagainya yang dikenal luas sejumlah daerah terutama di pulau Jawa, merupakan salah satu bukti konkret bagi keberlakuan atau diberlakukannya hukum ekonomi Islam di Nusantara tempo dulu. Demikian pula dengan simbol-simbol transaksi perdagangan disejumlah pasar tradisional yang terkesan kental dengan mazhab-mazhab Fiqh yang dikenal masyarakat.

⁷ Umar Vadillo, *Bank Tetap Haram (Kritik Terhadap Kapitalisme, Sosialisme Dan Perbankan Syari'ah)*, Jakarta: Puzam, 2005, hlm. 122

Dari sisi komoditas yang mendiami wilayah Republik Indonesia, yang sebagian besarnya adalah pemeluk agama Islam. Atas dasar ini, maka sungguh merupakan kewajaran bila hukum sebuah negara dipengaruhi oleh hukum agama yang dianut oleh bagian terbesar penduduknya. Pemberlakuan hukum ekonomi Islam di Indonesia sama sekali tidak terkait dengan apa yang lazim dikenal dengan sebutan dikfator mayoritas dan atau tirani minoritas, karena penerapan hukum ekonomi Islam tidak dilaksanakan secara paksa apalagi dipaksakan. Sistem ekonomi Islam termasuk sistem hukumnya berjalan sebanding dan sederajat dengan sistem ekonomi dan sistem hukum ekonomi konvensional.

Dari sudut pandang kebutuhan masyarakat, kehadiran sistem ekonomi Islam di Indonesia juga disebabkan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Terbukti dengan keterlibatan aktif lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga lain yang juga menerima kehadiran sistem ekonomi Islam.

Dari sudut pandang sejarah, jauh sebelum Republik Indonesia merdeka, atau dijajah oleh Belanda, negeri ini sudah dihuni oleh penduduk yang jelas-jelas beragama, khususnya agama Islam yang kemudian keluar sebagai mayoritas tunggal sampai atau paling tidak sebagian daripadanya masih tetap diberlakukan sampai sekarang.

Dari beberapa sudut pandang di atas, yaitu sudut pandang sejarah, komunitas bangsa Indonesia, kebutuhan masyarakat, dapat dilihat hukum ekonomi Islam dalam perkembangannya sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangannya.

Oleh karena Bank Syariah tidak mengenal imbalan berupa bunga dalam simpan pinjam, maka imbalannya adalah bagi hasil bagi resiko. Ini berlaku baik nasabah penyimpan maupun nasabah peminjam. Kepada nasabah penyimpan uang akan diberi imbalan keuntungan, apabila operasional usaha Bank Syari'ah beruntung, sebaliknya apabila Bank rugi, resiko kerugian dipikul bersama.

Jadi nasabah penyimpan uang tidak otomatis memperoleh imbalan atas dana yang disimpannya. Boleh jadi justru ia harus ikut serta menanggung resiko atas simpanannya tersebut. Semua itu tergantung apakah Bank untung atau rugi dalam usahanya.

Begitu pula dengan nasabah peminjam, apabila peminjam, memperoleh keuntungan dalam usahanya, maka ia wajib membagi keuntungan itu dengan pihak bank, sebaliknya jika rugi, maka kerugian tersebut dipikul bersama dengan pihak bank. Jadi bank tidak otomatis memperoleh keuntungan atau imbalan atas dana yang dipinjamkannya. Boleh jadi bank harus ikut menanggung kerugian yang dialami oleh pihak peminjam. Semua itu tergantung apakah nasabah untung atau rugi dalam usahanya. Dengan kata lain hubungan antara simpan pinjam dengan Bank Syari'ah tidak ada kepastian menerima imbalan (bagi nasabah penyimpan), juga tidak ada kepastian membayar (bagi nasabah peminjam) potensial menanggung sebagian resiko kerugian yang dialami.

Keuntungan merupakan perbedaan antara nilai (harga) pasar dari komoditas yang diperoleh usaha itu. Ketika pelaksanaan usaha tidak membagikan keuntungan dan ia melakukan estimasi keuntungan, maka itu dapat dianggap riba.

Namun mungkin saja para pihak yang terlibat dalam perjanjian usaha itu berkeinginan untuk memperpanjang kontrak usaha mereka dan melanjutkan keuntungan yang telah diperoleh dengan cara menetapkan suatu pembayaran yang dapat diterima dan saling menguntungkan seperti pembayaran sebagian (cicilan) dari total keuntungan. Namun, pembayaran yang dapat diterima dan saling menguntungkan itu menunjukkan jika salah satu pihak tidak sepakat, ia dapat menghentikan usahanya dengan cara menjual komoditas perusahaan terlepas dari benar tidaknya estimasi keuntungan yang dilakukan.

Sistem penghitungan dalam perusahaan modern yang diadopsi bank Islam bukanlah keuntungan yang sebenarnya didapat dari usahanya melalui perjanjian. Perjanjian tersebut dapat menunjukkan bentuk yang ribawi. Bahkan selain adanya kenyataan bahwa perjanjian itu tidak selalu benar, ada satu bukti bahwa perjanjian yang dibuat oleh bank, maka bank harus meninggalkan hak-hak kepemilikannya.

Intinya, riba dapat merusak pasar dan mengubahnya menjadi sistem yang ribawi. Tidak ada cara untuk membentuk pasar yang adil tanpa keluar dari sistem moneter dan keuangan modern. Terlepas dari riba atau bukan, untuk kemajuan perkembangan perekonomian Indonesia yang sebagian masyarakatnya memeluk agama Islam, lembaga keuangan sangat dibutuhkan.

B. Pelaksanaan Akad Bagi Hasil

Dalam Akad Bagi Hasil ada dua (2) macam akad yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Kedua akad ini hampir sama antara yang satu dengan yang lain, perbedaan hanya terdapat dalam porsi permodalannya saja.

Akad mudharabah adalah kerja sama usaha antara nasabah dengan bank, dimana bank membiayai usaha tersebut secara keseluruhan modal secara 100%. Sedangkan musyarakah adalah kerja sama usaha antara nasabah dan bank, dimana bank membiayai usaha nasabah dengan berbagi modal kurang dari 100%.

Jadi jika bank memberikan pembiayaan sebagai tambahan modal atas usaha yang sudah berjalan, maka pembiayaan ini menggunakan akad musyarakah. Namun, jika bank memberikan pembiayaan sepenuhnya terhadap permodalan usaha, maka pembiayaan ini disebut sebagai pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan Mudharabah hanya cocok pada pembiayaan proyek Financin, yaitu pembiayaan untuk sebuah proyek tertentu yang terpisah dari permodalan perusahaan. Seperti pada usaha percetakan yang sudah berjalan. Mudharabah dapat dilakukan proyek tertentu dalam percetakan tersebut, misalnya untuk mengerjakan pesanan besar dari sebuah perusahaan, jadi bank hanya membiayai proyeknya saja bukan membiayai perusahaannya, dan bagi hasil atas modal dihitung dari keuntungan proyek saja, bukan dari keseluruhan perusahaan tersebut. Dalam teknik operasionalnya, Bank Syariah menghimpun dana umat baik kecil maupun besar, sehingga tercapai bilangan besar dan membentuk

sebuah himpunan kekuatan yang sangat luar biasa. Dalam menghimpun dana Bank Syari'ah, menerima tabungan, deposito dan investasi dan masyarakat dengan konsep Mudharabah dan dengan sistem bagi hasil.

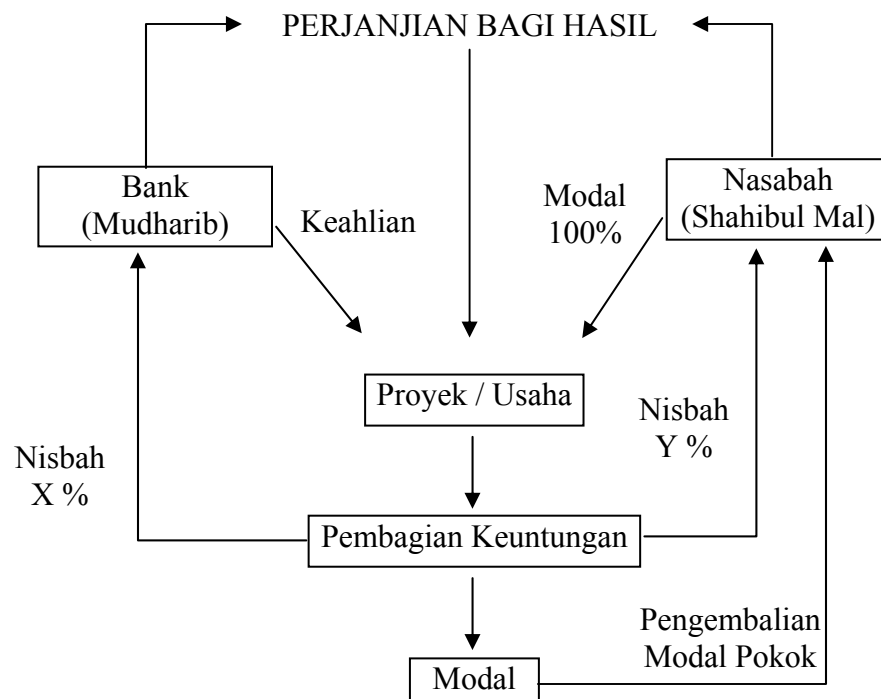
Menyimpan dana di bank maka dana tersebut akan diinvestasikan oleh bank secara optimal untuk membiayai umat. Dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah disetiap bulannya merupakan usaha-usaha yang tidak diragukan kehalalannya. Bank Syari'at mengimplementasikan pola bagi hasil atas pendapatan (*revenue sharing*), atau bagi hasil keuntungan (*profit sharing*), yang berarti bank membagikan hasil usaha secara penuh dan adil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sebelum dikurangi biaya-biaya operasional Bank.

Setiap akhir bulan Bank akan menghitung pendapatan yang berasal dari tiap Rp. 100 (seribu rupiah / dana nasabah kemudian membagihasilkan sesuai nisbah yang disepakati.

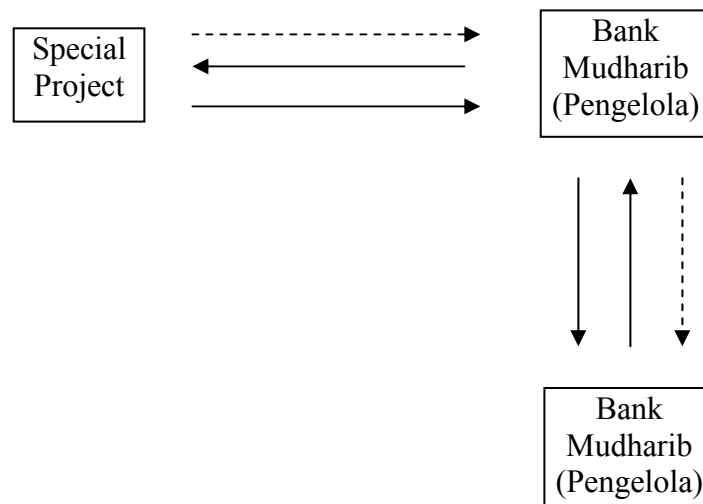
Dalam konsep penghimpunan dana dengan sistem Mudharabah atau bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia, nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak sebesar 51 : 49 (nasabah : bank), 47 : 53 untuk BRI Syari'ah, 45 : 55 untuk BSM dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank. Dan dalam hal akan dilakukan perubahan nisbah diumumkan melalui koran dengan peredaran Nasional, dan berlaku minimal satu minggu setelah pengumuman tersebut dikeluarkan. Kewajiban untuk mengumumkan perubahan tersebut adalah untuk menaikkan nisbah bagi hasil porsi nasabah. Jenis Mudharabah berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Mudharab, antara lain :

- Mudharabah Mutlaqoh, Aplikasi di perbankan merupakan investasi tidak terikat berupa deposito dan tabungan
- Mudharabah Muqayyadah, Investasi terikat.

Skema Mudharabah Mutlaqah



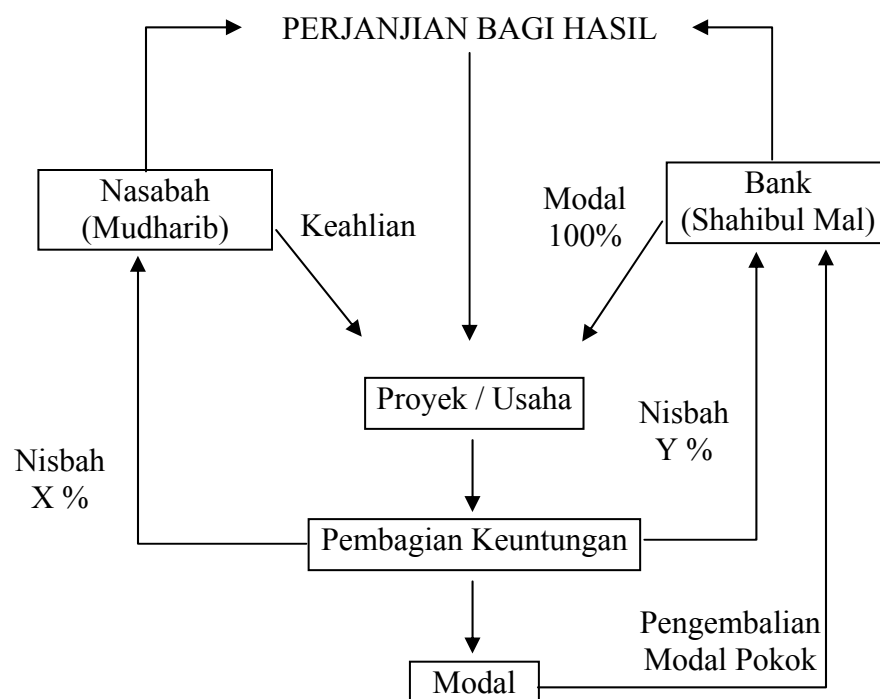
Skema Mudharabah Muqayyadah



Dalam hal konsep penyaluran dana dengan sistem Mudharabah bank selaku Shahibul Maal memberikan dana kepada nasabah untuk menjalankan suatu usaha yang disepakati bersama. Yang mana jenis usaha tersebut harus jelas. Dan dalam pembiayaan ini, antara bank dan nasabah berbagi hasil dengan nisbah yang disepakati bersama. Dan usaha tersebut tidak boleh menggunakan dana untuk kepentingan atau usaha di luar perjanjian / ahad.

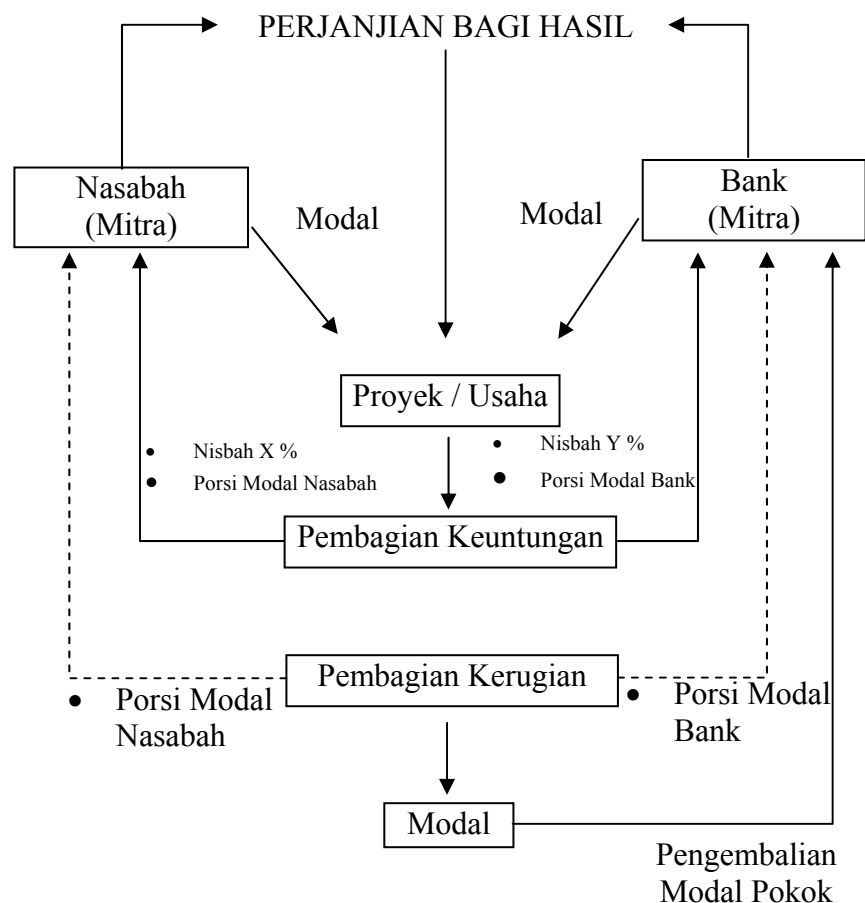
Skema penyaluran dana Prinsip Bagi Hasil Mudharabah (Bank sebagai Shahibul Maal)

- Akad antara pemilik modal dan pengelola dana untuk berusaha guna mendapatkan keuntungan dan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad.
- Prinsip bagi hasil usaha terdiri dari revenue sharing atau profit sharing. Jadi bank hanya berasumsi pada usaha yang harus untung.



Konsep penyaluran dana dan prinsip bagi hasil Musyarakah yaitu kerjasama perkongsian yang dilakukan antara nasabah dan Bank Muamalat dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan, dengan kata lain Musyarakah merupakan akad untuk usaha patungan untuk membiayai usaha yang halal dan produktif. Jenis usaha yang dapat dibiayai yaitu perdagangan, industri / manufacturing, usaha atas kontrak dan lain-lain.

Skema penyaluran dana patungan / prinsip bagi hasil Musyarakah.



Syarat Mendapatkan Pembiayaan Bagi Hasil

Perusahaan yang ingin mendapatkan pembiayaan bagi hasil harus memiliki pembukuan yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, bank dan konsumen juga perlu membuat kesepakatan laporan laba rugi. Konsumen atau nasabah. Dan selalu melaporkan kepada bank atas usaha yang dapat diakui sebagai pemasukan dan oengeluaran perusahaan yang nantinya dibagi hasilkan dengan bank.

Pembiayaan bagi hasil hanya ditujukan untuk kebutuhan suatu usaha yang diajukan oleh badan usaha atau perorangan yang memiliki usaha saja. Oleh karena itu, pembiayaan bagi hasil dapat diajukan oleh badan usaha aatau perorangan memiliki usaha saja.

Untuk usaha perseorangan, orang yang bersangkutan harus terlebih dahulu melengkapi legalitas usahanya agar dapat dibiayai oleh bank. Hal tersebut tidak bermasalah bagi badan usaha karena badan usaha biasanya sudah memiliki dokumen-dokumen yang lengkap.

Adapun persyaratan umum untuk mendapatkan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia antara lain :

- a. Pembiayaan konsumtif dengan pengajuan minimal Rp. 50 juta (Pembiayaan Perorangan)
 - Usia 21-54 tahun (tidak melebihi usia pensiun)
 - Masa kerja minimal dua tahun
 - Foto copy KTP suami istri sebanyak dua buah

- Foto copy Kartu Keluarga
- Foto copy Surat Nikah
- Foto copy Persetujuan Suami Istri
- Slip gaji asli selama 3 bulan terakhir
- Surat keterangan rekomendasi dari perusahaan
- Foto copy NPWP (bagi pengajuan di atas Rp. 100 juta)
- Foto copy jaminan (tanah, bangunan atau kendaraan yang dibeli)
- Rekening bank selama 3 bulan terakhir
- Angsuran tidak melebihi 40 % dari gaji pokok

b. Pembiayaan Koperasi

- Surat permohonan
- Foto copy NPWP
- Foto copy SIUP
- Foto copy TDP
- AD / ART Koperasi dan perubahannya
- Surat pengesahan dari Departemen Koperasi
- Susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh Departemen terakhir
- Cash Flow projection selama masa pembiayaan
- Data jaminan
- Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha
- Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat

c. Pembiayaan Korporasi

- Surat permohonan
- Foto copy NPWP
- Foto copy TDP dan Kelengkapan izin usaha lainnya
- Foto copy KTP Direksi
- Company Profile
- Akta pendirian dan perubahannya
- Surat pengesahan dari Departemen Kehakiman
- Foto copy rekening koran 3 bulan terakhir
- Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- Cash Flow projection selama masa pembiayaan
- Data jaminan
- Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha
- Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat

Syarat-syarat umum yang harus dipeuhi oleh konsumen / nasabah jika ingin mengajukan pembiayaan bagi hasil di Bank Syari'ah Mandiri, adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan Perorangan

- Identitas diri dan pasangan
- Kartu Keluarga dan Surat Nikah
- Legalitas Usaha
- Laporan keuangan 2 tahun terakhir

- Past Performance 2 tahun terakhir
- Rencana usaha 12 bulan yang akan datang
- Data obyek pembiayaan

b. Pembiayaan Badan Usaha

- Akte Pendirian Usaha
- Identitas Pengurus
- Legalitas Usaha
- Laporan Keuangan 2 tahun terakhir
- Past Performance 2 tahun terakhir
- Rencana Usaha 12 bulan yang akan datang
- Data obyek pembiayaan

Persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam pembiayaan bagi hasil ini adalah proyeksi keuangan yang akan datang. Untuk mendapatkan persetujuan, konsumen harus terlebih dahulu membuat proposal yang berisi kinerja perusahaan sekarang dan kinerja perusahaan jika kemudian mendapatkan pembiayaan Bank perlu mengetahui proyeksi keuangan masa nanti tersebut untuk menentukan kelayakan usaha untuk dibiayai, selain juga untuk menentukan besarnya nisbah bagi hasil yang nantinya disepakati bersama.

Sebelum bank menyetujui pembiayaan bagi hasil tersebut, bank juga melakukan analisis keuangan terhadap nasabah atau perusahaan yang mengajukan proposal pembiayaan. Adapun proses pembiayaan bagi hasil adalah sebagai berikut :

1. Collecting Data (Pengumpulan dokumen nasabah, Solisitasi, Investigasi).
2. Analisa Pembiayaan (Diajukan oleh Analyst Officer dalam Format Nota Analisa Pembiayaan).
3. Pemutusan Pembiayaan dilakukan oleh Komite Pembiayaan.
4. Persetujuan Pembiayaan.
5. Pengikatan Pembiayaan yaitu tanda tangan akad dan pengikatan jaminan.
6. Realisasi Pembiayaan.
7. Penyimpanan Dokumen, dilakukan oleh Administrasi Pembiayaan.
8. Pembayaran angsuran / bagi hasil (selama jangka waktu pembiayaan)
9. Pembinaan dan Pengawasan (monitoring), sesuai dengan peraturan dan kebijakan.
10. Pelunasan / Penyelesaian Pembiayaan (Review pembiayaan, oemecahan masalah pembiayaan).
11. pengembalian dokumen jaminan kepada nasabah.

ANALISA

Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan pada masa kini, memerlukan jasa perbankan ; Dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yatiu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan / atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Fatwa MUI No : 02 / DSN – MUI / IV – 2000 tentang tabungan, menetapkan bahwa ada dua jenis :

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara Syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Berdasarkan ketentuan atau Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tersebut di atas, Bank Syari'ah menggunakan tabungan dengan prinsip Mudharabah, sedangkan prinsip Wadi'ah diterapkan pada produk Giro. Dalam akad Mudharabah ini nasabah bertindak sebagai Shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai Mudharib atau pengelola dana. Dan esensi dari Mudharabah adalah satu akad kerjasama kemitraan berbagai untuk dan rugi (*Profit and Loss Sharing*), dilakukan sekurang-kurangnya dua orang, yang pertama memiliki dana dan yang kedua memiliki keahlian dan tanggung jawab atas pengelola dana. Secara teknis Mudharabah terjadi apabila pihak pertama mempercayakan modalnya kepada pihak kedua untuk dikelola dananya untuk usaha yang dihalalkan agama. Jika kemudian dari usaha yang dijalankan pihak yang kedua menghasilkan keuntungan, masing-masing berhak atas keuntungan tersebut yang porsinya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal saat penandatanganan perjanjian. Namun pada kenyataannya pada saat penandatanganan, kesepakatan bagi hasil tidak benar-benar kesepakatan antara bank dan nasabah, tetapi bank sudah menentukan porsi bagi hasilnya, jadi

nasabah tidak bisa menawar berupa besar porsi nisbah yang ingin diperoleh nasabah. Di sini sepiut ada rasa ketidakadilan antara bank kepada nasabah karena sebaliknya apabila perjanjian atau akad Mudharabah terjadi antara bank dan nasabah. Bank berperan sebagai Shahibul maal (pemilik dana) dan nasabah sebagai Mudharib, yang berarti terjadi akad pembiayaan, maka bank sebagai pemilik dana di sini sudah mematok porsi nisbah yang harus diterima oleh bank.

Akad tabungan Mudharabah ini tidak ada nash atau kesepakatan pada ulama yang melarang atau membolehkan bank untuk menentukan porsi nisbahnya dari pihak bank sendiri. Jadi hukumnya menurut penulis adalah termasuk syubhat karena tidak ada dalil yang mengharamkan.

Seperti yang telah kita ketahui, Mudharabah merupakan suatu akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana. Dalam hal pembiayaan berarti bank adalah sebagai pemilik modal dan nasabah bertindak sebagai Mudharib. Bank memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbagi hasil sebagai modal pengelolaan proyek atau usaha halal tertentu yang dianggap Feasible. Karena landasan Mudharabah adalah murni kepercayaan dari pemilik dana. Fatwa MUI No : 07 / DSN – MUI / IV / 2000 tentang pembiayaan Mudharabah,⁸ telah menetapkan ketentuan pembiayaan Mudharabah sebagai berikut :

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

⁸ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah), Jakarta: DSN MUI dan BI, 2001, hlm. 43-44

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai Shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai Mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dana pebagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan Mudharib).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari Mudharabah kecuali jika Mudharabah (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan, namun agar Mudharib tidak melakukan penyimpanan, LKS dapat meminta jaminan dari Mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila Mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan Fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada Mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, Mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Melihat ketentuan pembiayaan di atas, Mudharabah merupakan pendanaan hanya untuk usaha yang produktif, jadi nasabah tidak boleh melakukan usaha di luar kesepakatan, karena menurut bank apabila terjadi kerugian dan nasabah menggunakan dana untuk usaha lain maka bank tidak akan menanggung kerugian tersebut. Hal tersebut dapat diterima karena berdasarkan Hadits Nabi riwayat Thabrani, yang artinya ; “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah ia mensyaratkan kepada Mudharib-nya agar tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (muhdarib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan

yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. “ (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Sebagaimana, tercantumkan dalam poin ke-3 ayat, ketentuan di atas, bahwa cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan harus berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam pelaksanaan akadnya Mudharabah (Sistem bagi hasil), di beberapa bank di atas memang dilakukan berdasarkan kesepakatan, namun ada beberapa kasus, yang menyatakan bahwa bagi hasil ditentukan oleh bank,⁹ tidak benar-benar disepakati atas kemauan antara kerelaan oleh nasabah, karena nasabah sendiri awam terhadap bagaimana sebenarnya prinsip Syari’ah.

Dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa Bank Syari’ah boleh mengambil atau meminta jaminan kepada nasabah, maka prinsip bagi hasil dengan cara Mudharabah ini, maka terlihat bahwa Bank Syari’ah mirip dengan Bank Konvensional yang menggunakan sistem bunga. Hanya saja dalam sistem Profit And Loss Sharing ini hasilnya tidak dijamin, sedangkan dalam basis bunga maka pinjaman tersebut tidak tergantung pada hasil yang untung dan rugi, sehingga si peminjam harus mengembalikan modal yang dipinjam ditambah bunga yang pasti tanpa peduli dengan bagaimana hasil dari penggunaan modal peminjam itu, jadi kerugian finansial sebagian langsung jatuh pada si peminjam. Sedangkan dalam Mudharabah, kerugian Finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemberi pinjaman, selama dalam pelaksanaan akad tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh penerima pinjaman (nasabah), kerugian yang dialami oleh

⁹ Wawancara dengan Ibu Eni, Nasabah Bank BRI Syari’ah

nasabah hanya rugi waktu dan tenaga yang diinvestasikan dalam perusahaan, dan tidak mendapatkan imbalan apa-apa dari pekerjaannya.

Dalam pelaksanaan akad Mudharabah ini, nisbah bagi hasil antara nasabah yang satu dengan nasabah yang lain berbeda, karena berdasarkan kesepakatan dan perjanjian, dan juga pengaruh dari besarnya modal yang ditanamkan.

Dalam pelaksanaan akadnya mula-mula bank menawarkan nisbah bagi hasil kepada calon nasabah, selanjutnya apabila tawaran itu disepakati, maka bank akan merealisasikan akad pembiayaan tersebut kepada nasabah, bank juga meminta syarat agar usaha tidak merugi. Dengan begitu apabila dalam kenyataannya terjadi kerugian dalam pelaksanaannya, maka bank dapat meminta pengembalian modal yang ditanamkan. Apabila kerugian tersebut diakibatkan kecurangan yang dilakukan oleh pengelola dana.

Pelaksanaan akad Mudharabah ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Karena dengan akad Mudharabah ini para pihak bisa dipercaya untuk bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dengan baik.

Akad atau perjanjian Mudharabah ini sudah memenuhi rukun dan syarat pembiayaan, antara lain :

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola dana (Mudharib) harus cakap hukum.

2. Pernyataan ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis.
3. Modal adalah sejumlah uang dan / atau aset yang diberikan oleh penyedia kepada Mudharib untuk tujuan usaha.
4. Keuntungan Mudharabah adalah sejumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (Mudharib), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana

Dan perjanjian / akad ini juga sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam penjelasan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, antara lain Pasal 8 ayat (2) :

“Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syari’ah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menetapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah.
- d. Kewajiban bank persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah.
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan / atau pihak-pihak terafiliasi.
- f. Penyelesaian sengketa.¹⁰

Para Fukaha, memfokuskan Mudharabah sebagai partisipasi dalam keuntungan dengan modal harta dari satu mitra dan modal kerja dari mitra lainnya. Jadi di sini ada peran ganda dari Mudharib yaitu sebagai wakil sekaligus mitra. Mudharib adalah wakil dari pemilik dana dalam setiap transaksi yang ia lakukan pada harta Mudharabah. Mudharib kemudian menjadi mitra dari pemilik dana ketika ada keuntungan, karena Mudharabah adalah sebuah kemitraan dalam keuntungan, dan seorang wakil tidak berhak mendapatkan keuntungan atas dasar kerja dia setelah munculnya keuntungan, tetapi ia menjadi seorang mitra dalam situasi ini disebabkan oleh perjanjian kemitraan. Harta Mudharabah menjadi

¹⁰ Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Tahun 1992, Jakarta: Asa Mandiri, 2006

milik bersama antara Mudharib dan pemilik modal, dan modal si Mudharib berdasarkan saham yang tidak dibagi dalam kepemilikan bersama. Semua pembagian keuntungan harus dinyatakan sebagai rasio atau sebagai bagian dari keuntungan total. Keuntungan tidak dapat dinyatakan sebagai suatu persentase dari modal yang diinventasikan. Prinsip ini merupakan syarat penting dari sebuah pelaksanaan akad / perjanjian yang sah. Penyimpangan apapun dari prinsip tersebut atau dari kondisi yang mengarahkan kepada ketidakpastian dalam persyaratan ini, akan membuat perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

Pinjaman bunga dan Mudharabah dapat dikatakan mewakili dua alternatif yang berlawanan dari segi permodalan. Transaksi Musyarakah menjadi jalan tengah diantara keduanya. Pelaksanaan akad Musyarakah, pihak pengusaha menambahkan sebagian modalnya sendiri pada modal yang dipasok para investor, dengan begitu maka pengusaha mau menanggung resiko terhadap resiko kehilangan modal. Dalam hal ini, kontribusi Finansial si pengusaha menentukan perbedaan antara dua model permodalan sistem Profit and Loss Sharing. Karena pihak pelaksana usaha juga ikut menanamkan modalnya, maka ia dapat mengklaim suatu persentase laba yang lebih besar.

Al Qur'an menggunakan istilah Musyarakah dengan kata Syirkah, yang artinya bersekutu seperti terdapat dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : *“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam seketika itu.” (An-Nisa’ : 12)*

Dan terdapat dalam Surat Shad ayat 24 :

وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : *“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang sholeh, dan amat sedikitlah mereka ini.” (Shad 24)*

Dan masih banyak lagi dalam Al Qur'an yang menerangkan tentang Musyarakah, meskipun tidak menyebutkannya secara langsung. Dan berdasarkan sejumlah riwayat hadits yang dinisbatkan kepada nabi dan para sahabatnya. Seperti riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda :

Artinya : *“Allah SWT berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak berkhianat kepada pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat maka aku keluar dari mereka. Abu Hurairah Daud yang dishahehkan oleh Al Hakim dan dari Abu Hurairah.”*

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa beberapa bentuk kemitraan pernah dipraktekkan pada generasi muslim awal. Pernyataan tersebut menunjukkan keberadaan suatu bentuk kemitraan, tanpa menunjukkan keberadaan suatu bentuk kemitraan, tanpa menunjukkan istilah-istilah, syarat-syarat atau konsep-konsep apapun yang dapat dikaitkan dengan kemitraan ini.

Pelaksanaan akad, setelah calon nasabah mengajukan proposal, dan bank menganalisa kesehatan usaha calon nasabah, maka bank melakukan penawaran nisbah bagi hasil kepada calon nasabah selama jangka waktu tertentu, selajutnya apabila tawaran itu disepakati, bank akan merealisasikan akad pembiayaan Musyarakah kepada nasabah. Dalam pembicaraan Musyarakah ini bank juga meminta jaminan kepada nasabah, agar nasabah tidak melenceng dari perjanjian sehingga mengakibatkan kerugian.

Dengan adanya jaminan yang disyaratkan oleh bank ini dengan alasan bahwa bank mengelola dana nasabah yang harus dijaga agar tetap utuh dan terbebas dari segala kemungkinan rugi. Namun apabila terjadi kerugian, pihak bank akan tetap menyelediki terjadinya kerugian tersebut. Adapun penyelesaian yang bermasalah bank akan melihat faktor-faktor sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Yaitu faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial.

2. Faktor Eksternal

Yaitu faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen seperti perekonomian dan perdagangan, perusahaan-perusahaan teknologi dan sebagainya.

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah bank biasanya menyelesaikan dengan melihat faktor-faktor internal lebih dulu, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial.

Apabila terjadi sengketa antara bank dan nasabah maka penyelesaian dapat dilakukan dengan menggunakan Arbitrase Syari'ah. Dalam lingkungan Syari'at Islam, yang sama dengan arbitrase adalah sistem tahkim dan kata kerjanya adalah hakam yang artinya menjadikan seseorang sebagai penengah / hakam bagi suatu sengketa.¹¹

Menurut Yahya Harahap, dalam tradisi Islam dikenal dengan hakam (Arbitrase) bersifat ad hoc, yang ciri-cirinya:

- a. Penyelesaian sengketa secara volunteer, diluar jangkauan peradilan resmi.
- b. Masing-masing pihak yang sengketa menunjuk seseorang atau lebih yang dianggap mampu, jujur, atau independent.
- c. Bertindak sebagai makamah arbitrase.
- d. Tugasnya sejak ditunjuk tidak dapat dicabut kembali (sampai selesai).
- e. Berwenang penuh menyelesaikan sengketa dengan cara menjatuhkan putusan yang putusannya bersifat final dan mengikat.¹²

Jadi arbitrase itu merupakan suatu sistem penyelesaian sengketa berdasarkan atas dasar kesepakatan / perjanjian secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dan putusannya bersifat final.

¹¹ Ahmad Djauhari, *Peran Arbitrase Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syari'ah Dan Legislasi Nasional, BPHN dan Debhun Danham RI, 2006, hlm. 4

¹² *Ibid.*

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum, yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 UU No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa). pilihan penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase berdasarkan perjanjian (akad) tertulis dari para pihak yang bersengketa.

Tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui Arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan.¹³

Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa mengatur tentang kompetensi absolut atau obyek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan Perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Ketentuan pasal tersebut antara lain :

1. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
2. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui Arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Jadi menurut ketentuan tersebut maka objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah hanya sengketa dibidang perdagangan,

¹³ Syamsudin Maran Sinaga, *Arbitrase Dan Kepailitan Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syari'ah Dan Legislasi Nasional, BPHN dan Debhum Danham RI, 2006, hlm. 2

perniagaan, dan sengketa yang timbul dalam lingkungan hukum. Perikatan seperti perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit.¹⁴

Semua pemeriksaan arbitrase dilakukan secara tertutup, dimaksudkan untuk menjaga citra dan bonafiditas para pihak yang bersengketa yang perlu dijaga kerahasiaannya. Putusan arbitrase harus sudah diucapkan dalam jangka waktu paling lama 180 hari sejak arbitrase atau majelis arbitrase terbentuk dan putusan tersebut bersifat final serta memikat para pihak.¹⁵

Apabila upaya penyelesaian diluar pengadilan tidak berhasil, maka penyelesaian sengketa dilakukan dipengadilan merupakan upaya terakhir perdamaian dalam syari'at Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian maka terhindarlah kehancuran silaturahmi diantara para pihak yang bersengketa dan sekaligus dapat mengakhiri permusuhan diantara pihak.

Anjuran berdamai diantara para pihak yang bersengketa dapat dilihat dalam Al-Qur'an: surat Al-Hujaraat ayat 9 yang artinya:

“Dan jika dua golongan dari orang-orang mu'min berperang, maka damaikan antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Syariat Islam sangat menganjurkan perdamaian dalam menyelesaikan sengketa termasuk sengketa pinjam meminjam uang (Utang Piutang) dengan pola bagi hasil. sebab penyelesaian utang piutang melalui pengadilan akan tetap berbekas dihati para pihak yang dapat menimbulkan kedengkian.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Kemitraan yang berdasarkan perjanjian seperti ini dapat dianggap bagus dalam sistem ekonomi Islam, karena para pihak yang terlibat telah dengan sengaja mengadakan sebuah kesepakatan untuk melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan serta resiko. Seperti sistem bagi hasil dengan cara Mudharabah, keuntungan dapat dibagi sesuai dengan proposi yang disepakati bersama. Yang menjadi acuan untuk pembagian bagi hasil sebuah Musyarakah adalah modal, partisipasi aktif dalam bisnis, dan pertanggungjawaban Musyarakah. Keuntungan harus didistribusikan diantara para mitra dalam bisnis berdasarkan proposi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh mereka. Bagian keuntungan masing-masing pihak dinyatakan sebagai suatu proposi atau persentase. Dan kerugian, harus dibagi sesuai dengan kontribusi modal. Dalam hal ini para ulama sepakat.

Menurut Hukum Islam ketika para pihak melaksanakan akad atau perjanjian berarti melakukan perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan), jadi akad tidak sekedar hanya kontrak antara dua pihak yang bertransaksi, namun ada keterkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.¹⁶

Dengan adanya suatu akad, maka para pihak terkait oleh ketentuan hukum Islam (Syari'at) yang berupa hak-hak dan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, akad harus dibentuk oleh hal-hal yang dibenarkan Syari'at Islam. Sahnya suatu akad menurut hukum Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad tersebut. Masing-masing bentuk

¹⁶ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Islam Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 11

perjanjian / akad yang dilakukan memiliki rukun dan syaratnya tersendiri. Rukun dan syarat tersebut secara garis besar dilihat sebagai berikut :

1. Rukun

Rukun pelaksanaan akad pada umumnya para ulama / Imam mazhab (Mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki) berpendapat bahwa rukun akad ada tiga, yaitu :

- a. Pernyataan untuk mengikatkan diri
- b. Para pihak yang melakukan akad
- c. Obyek akad

Di lain pihak, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu ijab dan kabul (penawaran dan penerimaan). Namun, kad itu juga merupakan pencerminan dari bertemunya penawaran (ijab) dengan penerimanaan (kabul) dari para pihak yang menimbulkan dampak bagi obyek akad.

Namun agar akad itu memiliki kekuatan hukum dan ada dampaknya, maka komponen pun harus ada.

2. Syarat

Menurut Hasbi Ash-Shieddieqy, syarat syahnya akad adalah sebagai berikut :

- a. Subyek Perikatan (akad)

Subjek akad dalam Hukum Perikatan adalah para pihak yang padanya terdapat ketentuan berupa pembebanan kewajiban dan perolehan hak. Pihak-pihak yang terlibat dapat berupa pribadi (perorangan) atau badan hukum.

b. Obyek Perikatan

Obyek perikatan di sini ialah benda yang berlaku padanya hukum akad. Dalam Hukum Islam, benda yang boleh menjadi Obyek Perikatan adalah benda-benda yang halal. Sehingga menurut Fiqh jual beli Anjing, babi, adalah tidak sah.

Adapun syarat-syarat obyek akad, yaitu :

- 1) Halal menurut Syara'
- 2) Bermanfaat
- 3) Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik
- 4) Dapat diserahkan
- 5) Dengan harga jelas

c. Tujuan Akad

Tujuan terjadinya perikatan Fiqh setelah dilaksanakannya tujuan yang dijanjikan atau setelah dilakukannya penyerahan.

d. Rukun Akad

Esensi dari Mudharabah adalah akad dari kedua belah pihak untuk salah satu seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan labanya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Rukun dari Mudharabah adalah adanya ijab kabul dan tidak diisyaratkan dengan lafaz tertentu dengan menunjukkan tujuan dan maknanya. Syarat-syarat Mudharabah adalah :

- 1) Modal berbentuk uang tunai
- 2) Modal itu harus diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan dari keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas persentasenya.
- 4) Mudharabah bersifat mutlak, tidak ada persyaratan si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri, barang atau waktu tertentu.

Berakhirnya akad Mudharabah, antara lain :

- 1) Tidak terpenuhinya syarat sahnya. Jika ternyata satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan pelaksana sudah memegang, maka dalam keadaan seperti ini ia berhak mendapatkan bagian dari sebagian upahnya karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan ia melakukan tugas yang ia berhak mendapatkan.
- 2) Bahwa pelaksana sengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Maka mudharabah menjadi batal dan ia berkewajiban menjamin modal jika rugi, karena dia menyebabkan kerugian.
- 3) Apabila pelaksana usaha meninggal dunia atau si pemilik modalnya. Jadi jika salah satu meninggal dunia, maka Mudharabah menjadi batal.

Musyarakah adalah akad antara orang-orang yang berbagi modal dan keuntungan. Rukun Musyarakah adalah :

- 1) Ada Ijab, yaitu pernyataan pihak pertama
- 2) Ada Kabul, yaitu persetujuan pihak kedua

Dan syarat Musyarakah adalah

- 1) Subyek adalah orang yang berakal sehat, dewasa, dan cakap bertindak hukum. Para pihak yang menjadi wakil dan mewakilkan, yaitu mereka yang berakal sehat dan telah tamyiz.
- 2) Obyek akad adalah hal-hal yang dapat diwakilkan agar memungkinkan setiap anggota sirkah / musyarakah bertindak hukum atas nama seluruh anggota.
- 3) Para pihak melakukan perjanjian suka rela.
- 4) Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota adalah sebagian dari keseluruhan keuntungan yang ditentukan secara presentase.
- 5) Barang modal atau uang umumnya dapat dihargai dan disertakan oleh masing-masing pihak untuk disatukan.

Musyarakah secara umum dapat diakhiri apabila :

- 1) Salah satu pihak membatalkan dengan atau tanpa persetujuan karena berdasarkan sukarela.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan bertindak.
- 3) Bila anggotanya dua (2) orang. Salah satu pihak meninggalkan perjanjian.
- 4) Salah satu pihak di bawah pengampunan. Misalnya pemboros.
- 5) Salah satu pihak dinyatakan pailit.
- 6) Modal para anggota lenyap/ hilang.
- 7) Lewat jangka waktu perjanjian Musyarakah.

Perjanjian pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah ini memiliki kesamaan dengan perjanjian persukutuan perdata yang diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUH Perdata.

“Perseroan / maatschap adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu ke dalam persetujuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”

Tujuan perjanjian atau persekutuan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang harus dibagi diantara anggotanya. Para pihak melakukan usaha dengan bersama-sama memberikan modal pada persekutuan dan para pihak berhak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan yang telah diperoleh dan sama-sama memikul kerugian yang dialami. Unsur-unsur perjanjian perseroan / persekutuan adalah :

1. Pemasukan / inbreng, pemasukan / inbreng menurut Pasal 1619 ayat (2) dapat berupa uang, barang atau benda, tenaga kerja, keahlian.
2. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dibagikan kepada para anggotanya.

Walaupun konstruksi hukum Perjanjian Musyarakah dan Perjanjian Mudharabah memiliki kesamaan dengan perjanjian persekutuan / perseroan, namun terdapat perbedaan pembagian hasil keuntungan. Dalam persekutuan perdata, pembagian nisbah bagi hasil diatur dalam Pasal 1633 sampai dengan 1635 ayat (1) KUH Perdata menentukan :

“Jika di dalam persetujuan atau perserikatan tidak telah ditentukan bagian masing-masing persero atau anggota dalam untung ruginya perseroan atau perserikatan, maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang telah dimasukkan dalam perseroan atau perserikatan.”

Dari Pasal di atas, tampak bahwa pembagian hasil keuntungan diserahkan pada kesepakatan bersama. Akan tetapi jika diperjanjikan maka pembagian hasil keuntungan dilaksanakan secara proporsional. Hal yang secara prinsip berbeda adalah apa yang diatur dalam Pasal 1633 ayat (2) KUH Perdata dimana untuk persero atau anggota yang hanya memasukkan kerajinannya dalam arti yang luas adalah tenaga, skill, manajemen, bagian keuntungan yang akan diperolehnya sama dengan bagian persero yang memasukkan uang atau barang yang paling sedikit. Cara pembagian yang secara seperti ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia.

Pembentuk Undang-Undang yang dilandasi oleh pemikiran materialisme kurang menghargai aspek kemanusiaan yaitu tenaga kerja baik fisik maupun pikiran, padahal untuk masa sekarang profesionalisme, skill, kualitas sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam proses produksi.

Pembagian keuntungan pada pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah ditetapkan oleh para pihak. Dan dalam praktek pembiayaan Mudharabah nisbah bagi hasil nasabah sebagai enterpreneur yang memasukkan

modal berupa tenaga atau keahlian lebih besar dibandingkan dengan bank yang memasukkan modal 100 % berupa uang.

Kontruksi hukum yang berbeda antara perjanjian kredit dan perjanjian pembiayaan menimbulkan kontra prestasi yang berbeda. Dalam perjanjian kredit bank, nasabah sebagai debitur harus mengembalikan kreditnya disertai dengan imbalan bunga (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998), sementara dalam pembiayaan bagi hasil nasabah sebagai mitra usaha selain harus mengembalikan uang sejumlah pembiayaan yang telah diberikan, juga disertai pembagian hasil keuntungan dari usaha yang telah dijalankan. Kontra prestasi berupa pembagian hasil keuntungan merupakan unsur yang fundamental yang membedakan Kredit Bank dengan Pembiayaan Berdasakan Bagi Hasil. Dilihat secara sepintas, tampaknya tidak ada perbedaan antara bunga dan imbalan atau pembagian hasil keuntungan karena keduanya merupakan kontra prestasi yang harus diberikan debitur kepada bank atas fasilitas yang disediakan oleh bank.

Akan tetapi berdasarkan falsafahnya, secara prinsip hal ini sangat berbeda. Dalam kontra prestasi berupa bunga, besar prosentase bunga telah ditetapkan pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani dan berlaku pada masa perjanjian tersebut dilaksanakan, dengan tidak melihat perkembangan situasi keuangan debitur, apakah usaha debitur mengalami perkembangan kemunduran atau mungkin dalam keadaan *collaps*, atau bahkan sampai mengalami pailit.

Dalam hal usaha debitur mengalami kemajuan yang pesat, maka debitur, maka debitur sendirilah yang akan menikmatinya sedangkan bank tetap menerima pengembalian pokok pinjaman disertai bunga sesuai dengan yang telah diperjanjikan sehingga tidak turut serta menikmatinya. Demikianlah sebaliknya dalam hal usaha debitur mengalami kemunduran atau bahkan sampai pailit, debitur sendirilah yang harus menanggung kerugian tersebut, walaupun misalnya kemunduran usaha tersebut bukan semata-mata karena kesalahan debitur tetapi misalnya karena adanya perubahan situasi perekonomian – *seperti yang sekarang ini terjadi* – atau karena adanya kebijakan tertentu dari pemerintah. sehingga dalam keadaan demikian debitur harus membayar pokok pinjaman ditambah dengan bunga bahkan dalam kasus-kasus tertentu jika debitur terlambat melaksanakan kewajibannya seringkali dibebani bunga berbunga yang semakin memberatkan.

Hal ini berbeda dengan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Bagi Hasil kedua belah pihak – *bank dengan debitur* – sebagai mitra usaha berdasar atas keadilan dan kebersamaan, bersama-sama mendapatkan keuntungan jika usaha debitur mengalami kemajuan dan menanggung kerugian jika mengalami kemunduran.

Perbedaan berikutnya adalah klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit dan klausula-klausula dalam perjanjian Mudharabah dan Musyarakah. Memperhatikan akta perjanjian kredit bank dan perjanjian pembiayaan baik pembiayaan Mudharabah maupun pembiayaan Musyarakah,

maka terdapat klausula-klausula ini terdapat dalam semua perjanjian tersebut. Tetapi ada beberapa klausula yang terdapat akta perjanjian kredir namun tidak terdapat dalam akta perjanjian pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.

Tentang adanya agunan dalam Bank Syari'ah, Al Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 283, telah menerangkan :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikan persaksian sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al Baqarah : 289).

Dari ayat di atas dapat diketahui, hukum Islam telah membolehkan adanya agunan dalam utang piutang. Namun agunan tersebut hanya untuk memastikan bahwa nasabah tidak boleh melakukan kecurangan dalam melakukan usaha atau mengelola dana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penghitungan bagi hasil (Profit and Loss Sharing) di beberapa Bank Syariah cabang Semarang, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme bagi hasil ditentukan oleh :

- Pendapat bank
- Nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah
- Nominal deposito nasabah
- Rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank

Mekanisme penghitungan bagi hasil

$$\text{Saldo rata-rata} \times \text{ER} \times \frac{30}{365} = \text{bagi hasil}$$

Sedangkan mekanisme penghitungan bunga dalam bank konvensional dihitung dari saldo akhir.

Dari contoh kasus mekanisme penghitungan bagi hasil dan bunga di atas, terlihat hampir sama, bahwa pembayaran bagi hasil lebih besar dari bunga, hanya saja dalam bagi hasil nisbah ditentukan di awal perjanjian, dan sistem bagi hasil tidak dapat memastikan keuntungan di muka. Apabila terjadi kerugian, maka Bank akan menutup kerugian dan nasabah tidak mendapatkan keuntungan. Namun, bank akan tetap menyelidiki terjadinya kerugian, apabila kerugian disengaja atau kelalaian nasabah, maka nasabah harus tetap

harus menanggung kerugian. Dalam pembiayaan Musyarakah apabila terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung bersama berdasarkan porsi modal yang disepakati. Meskipun yang harus dibayar nasabah lebih banyak dan lebih mahal, namun itu tetap dapat diterima oleh hukum Islam karena diantara nasabah dan bank telah melakukan kesepakatan di awal perjanjian tentang nisbah bagi hasil, baik hasilnya rugi maupun untung, sementara sistem bunga pada bank konvensional tidak dibenarkan oleh sebagian umat Islam dan dianggap riba, karena yang ditetapkan sebelumnya adalah keuntungan saja.

2. Ada dua macam akad bagi hasil, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Kedua akad ini hampir sama satu sama lain, perbedaannya hanya terletak pada komposisi permodalan usaha. Jika bank memberikan pembiayaan sebagai tambahan modal atas usaha yang sudah berjalan, maka pembiayaan menggunakan akad musyarakah. Namun, jika bank memberikan pembiayaan sepenuhnya terhadap permodalan usaha, maka pembiayaan ini disebut sebagai pembiayaan mudharabah.

Dalam pelaksanaan kedua akad tersebut di atas, sudah sesuai dengan pelaksanaan yang berlaku dalam Islam, hanya saja bank dalam penentuan nisbah, sering kali (terjadi) hanya ditentukan sepihak (oleh pihak bank), dengan alasan untuk mempercepat jalannya pelaksanaan akad. Selain itu akad/perjanjian tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan, tidak terdapat klausul-klausul yang merugikan mitra usaha.

B. Saran-saran

1. Bank syari'ah beroperasi berdasarkan prinsip Syari'ah, yaitu hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah. Untuk memudahkan orang memahami dan melaksanakannya perlu disusun Undang-undang tentang perjanjian-perjanjian pada bank syari'ah.
2. Sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syari'ah tentunya aspek syiar Islam merupakan bagian terpenting dari operasional bank. Syia'ar Islam tidak hanya dalambentuk normatif kajian kitab. Tetapi juga hubungan antara perusahaan dengan masyarakat, misalnya, nasabah dipermudah dalam pengambilan haknya.

Demikian yang dapat penulis kemukakan, semoga Allah SWT senantiasa selalu membimbing kita pada jalan-Nya. Amien.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli dan Janwani, Yadi, *Lembaga-lembaga Perekonomian Ummat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam)*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Al Muslih, Abdullah – Ash, Shawi, Shalah, *Bunga Bank Haram? (Menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat)*, Jakarta : Darul Haq, 2003.
- Al Qur'an dan Terjemahannya, Medinah, Arab Saudi : Muja'mma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mus-haf Asy Syarif, 1421 H.
- Ali, Muhammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI-Press, 1988.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta : Tazkia Institute, 1999.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Pustaka Alvabert, 2005.
- Ash Shidieqy, TM. Hasby, *Pengantar Fikih Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1984.
- Aziz, M. Amin, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia I*, Jakarta : Bangkit, 1992.
- Aziz, M. Amin, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia II*, Jakarta : Bankit, 1992.
- Basyaib, Hamid, *Bank Tanpa Bunga*, Yogyakarta : Mitra Gami Widya, 1993.
- Basyir, Ahmad Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yoğ UII Press, 2000.

- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Djamali, Abdul, *Hukum Islam*, Bandung : Mandar Maju, 1992.
- Fahrudi, Fuad Muhammad, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung : PT. Al-Maarif, 1980.
- Gozali, Ahmad, *Serba-serbi Kredit Syariah (Jangan Ada Bunga Diantara Kita)*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2005.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang : UMM Press, 2004.
- Hasan, Ali M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, Ali M, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasbi As Shiddiegy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta : CV. Mulya, 1967.
- Hasibuan, Malayu S.P., *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2001.
- Hidayat, Anas dan Malian, Sobirin, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta : UII Press, 2002.
- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah), Jakarta : DSN MUI, BI, 2001.
- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2002.
- Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Bandung : Mandar Maju, 2002.
- Jafar, Muhammad, *Pengantar Ilmu Fiqh : Suatu Pengantar Tentang Ilmu Hukum Islam Dalam Berbagai Mazhab*, Jakarta : Kalam Hidup, 1993.
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : III T, 2003.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 3. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khalil, Jafril, *Prinsip Syari'ah Dalam Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis (Agustus), 2002.

- Lewis, Mervyn – Algaoud, Latifa, *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktik, Prospek)*, Penterjemah : Burhan Wirasubrata, Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Lubis, Suhrawardi K, *hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Mas'adi, Ghufroon A., *Fiqh Muamalah*, cet. 1. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Modul, *Short Course Bank Syari'ah*, Yogyakarta : Bank Muamalat Indonesia, Pusat STEI, 2006.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, Abi Abdullah bin Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari, Juz III, Dar Al Kitab Al Alamiyah, Beirut.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, Cet. 3.
- Narboko, Cholid – Ahamdi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University, 2000.
- P. Chairuman dan Lubis K, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Grafindo, 2000.
- Parmudi, Muchammad, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, Yogyakarta, Kutub, 2005.
- Qordhawi, Yusuf M, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Bandung : Bina Ilmu.
- Qordhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.
- Qordhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani, 1995.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam III*, Penterjemah Soeroyo Nastangin, Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yasa, 2002.
- Ramulyo, Mohd, Idris, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Rifa'i Moh, Zuhri Moh, dan Salomo, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang : Toha Putra, 1978.
- Rusya, Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid (juz III)*, Semarang : Asy Syifa', 1990.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah 13*, Alih Bahasa Kamaludin A. Marzuki, Bandung : Al Ma'arif, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 12*, Alih bahasa Kamaludin A. Marzuki, Bandung : Al Ma'arif, 1996.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah : Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Penerjemah : Afif Maftuhin, Para Madina, Jakarta, 2004.
- Shidik, Saifudin, *Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta : Intimedia, 2004.
- Soejono – Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta ; Rineka Cipta, 2003.
- Soejono – Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta ; Rineka Cipta, 1999.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1990.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta : Ekonomi, 2005.
- Syahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama, Grafiti, 1999.
- Tim Penyusun Briefcase Book, *Edukasi Profesional Syari'ah Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, Jakarta : Renaisan, 2005.
- Tim Penyusunan Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia (IAI), *Pedoman Akuntansi perbankan Syari'ah Indonesia*, Jakarta : IAI, 2003.
- Uman, Cholil, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya : Ampel Suci Surabaya, 1994.
- Usman, Husaini dan Aktar, Purnama Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Vadillo, Umar, *Bank Tetap Haram : Kritik Terhadap Kapitalisme, Sosialisme dan Perbankan Syariah*, Penerjemah : Sigit Kurnadi dan Tri Joko S., Jakarta : Puzam, 2005.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta : Gradindo, 2005.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : Gunung Agung, 1997.

BROSUR-BROSUR

Brosur “Laporan Keuangan Bank Syari’ah Mandiri”

Brosur “Manfaat Layanan Perbankan dari Bank Syari’ah Terbesar dengan Jaringan Terluas”,
Bank Syari’ah Mandiri.

Brosur “Pembiayaan Bank BRI Syari’ah”

Brosur “Produk Bank Muamalat Indonesia”

Brosur “Tabungan Bank BRI Syari’ah”

Brosur “Tabungan Bank Syari’ah Mandiri”

PERUNDANG-PERUNDANGAN

UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

UU RI No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

UU RI No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Perundang-undangan Perbankan di Indonesia, Jakarta : Harvarindo, 2003.

Suparni, Niniek, KUH Perdata, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.

UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

MAKALAH-MAKALAH

Agustianto, *Legislasi Ekonomi Syariah di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syari'ah dan Legislasi Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tanggal 6 s/d 8 Juni 2006.

Djauhari, Ahmad, *Peran Arbitrase Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syari'ah dan Legislasi Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tanggal 6 s/d 8 Juni 2006.

Hasanudin, *Pengembangan Lembaga Keuangan Syari'ah Selain Perbankan Dan Asuransi*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syari'ah dan Legislasi Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tanggal 6 s/d 8 Juni 2006.

Nurdin, Andriani, *Penyelesaian Sengketa Niaga Di Pengadilan Negeri Sebagai Cikal Penyelesaian Sengketa Niaga Syari'ah Di Pengadilan Agama*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syari'ah dan Legislasi Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tanggal 6 s/d 8 Juni 2006.

Sarkaniputra, Murasa, *Ruang Lingkup Ekonomi Syari'ah Tinjauan Teori Dan Praktek Di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syari'ah dan Legislasi Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tanggal 6 s/d 8 Juni 2006.

Sinaga, Syamsudin Manan, *Arbitrase Dan Kepailitan Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syari'ah dan Legislasi Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tanggal 6 s/d 8 Juni 2006.

Suma, Muhammad Amin, *Arah Pengembangan Hukum Ekonomi Islam / Syari'ah Di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syari'ah dan Legislasi Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tanggal 6 s/d 8 Juni 2006.